

Buletin BPIW • Sinergi

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



**Mewujudkan Pemerataan Hunian
Untuk Semua Kalangan Masyarakat**

Pembangunan Infrastruktur PUPR Benahi Jabodetabek



Edisi 06/Juni 2016



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Telp. +6221-7279 8112

Pelindung:

A. Hermanto Dardak

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Hadi Sucahyono
Harris H. Batubara
Rezeki Peranginangin
Kuswardono

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shovich

Redaksi:

Etty Winarni
M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal
Aji Noor M.
Shahnaz Acrydiena

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Dian Rosnawati

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
No. Telp. +6221-7279 8112

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:

humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Juni ini, kami menfokuskan soal kota baru. Kabar Utama akan mengupas mengenai Metropolitan Jabodetabek. Dalam kabar utama ini dibahas mengenai berbagai hal seperti tantangan dan rencana pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR.

Kemudian untuk rubrik wawancara akan menampilkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam rubrik tersebut dibahas seputar penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja. Selain itu rubrik ini juga diisi dengan wawancara dengan Kepala BPIW, Hermanto Dardak yang membahas mengenai harmonisasi pembangunan infrastruktur dan kawasan pada pengembangan kota baru publik di Indonesia.

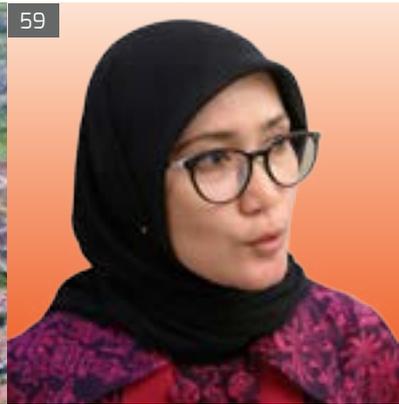
Untuk laporan khusus dibahas secara detil mengenai pengembangan Kecamatan Maja yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang menjadi Kota Baru Publik Maja. Selanjutnya, dalam rubrik opini akan diisi oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus. Dalam rubrik tersebut dibahas mengenai pembangunan infrastruktur pada kawasan perdesaan.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Juni, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan potensi wisata yang berada di Gili Trawarangan Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai cara merawat mata agar tetap sehat meski berlama-lama di depan layar komputer. Kemudian pada rubrik *Glossary* menampilkan istilah tentang kota. Demikian berbagai informasi yang kami sajikan pada edisi ini. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 06/Juni 2016



03 SALAM REDAKSI

04 DAFTAR ISI

05 PERSPEKTIF

Cegah *Urban Sprawl* dengan Pengembangan Kota Baru

06 KABAR UTAMA

Pembangunan Infrastruktur PUPR Benahi Jabodetabek

12 REVIEW

Program Negara untuk Memandu Pertumbuhan Kota Berpola Menyebar (*Sprawl*)

13 GLOSSARY

Istilah Tentang Kota

14 WAWANCARA

Kerjasama Tidak Berakhir pada Saat Dilakukan Penandatanganan

20 TEROPONG MEDIA

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

22 KILAS BPIW

Kerja Sama Antar Sektor Dapat Memaksimalkan Pembangunan Infrastruktur

38 LAPORAN KHUSUS

Kota Baru Publik Maja, Solusi Mengurangi Beban Jabodetabek

44 OPINI

Pembangunan Infrastruktur Kawasan di Perdesaan

48 WPS Corner

Wilayah Pertumbuhan Strategis 5 & 6

50 INFOGRAFIS

Keterpaduan Dengan Pengembangan 48 Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi

52 TEKNOLOGI

TBS Land Airbus, Transportasi Masa Depan yang 'Mengapung'

56 JALAN-JALAN

Eksotisme 3 Gili Lombok

56 POTRET

Penandatanganan Kesepakatan Kota Baru Maja

68 TIPS

Mata Tetap Sehat Didepan Layar Komputer

59 TOKOH

Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak Provinsi Banten

Cegah *Urban Sprawl* dengan Pengembangan Kota Baru

Kota memiliki banyak fasilitas, sarana dan pasarana yang modern, dimana memudahkan masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bukan hanya itu, kota juga menjadi sarana aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan berbagai keunggulan tersebut, maka tak heran prosentase masyarakat yang tinggal di perkotaan terus meningkat. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan dari 237,6 juta penduduk, maka 49,8% tinggal di perkotaan. Tahun 2015 prosentasenya meningkat menjadi 53,3%.

Agar tidak terjadi urban sprawl atau penyebaran penduduk yang tidak terkendali, maka RPJMN 2015-2019 mengamanatkan dibangunnya 10 kota baru yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali. Pembangunan kota baru tersebut diperuntukkan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Ke-10 kota baru tersebut adalah Sei Mangke di Provinsi Sumatera Utara, Maja di Banten, Bandar Kayangan di Lombok, Pontianak di Kalimantan Barat, Sofifi di Maluku Utara, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Sorong, Manado, Banjar Baru, dan Palembang.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diamanatkan pemerintah untuk merencanakan dan menyusun development plan 10 kota baru publik tersebut. Hingga saat ini, yang sudah ditangani BPIW sebanyak enam kota baru publik, yakni Sei Mangke di Sumatera Utara, Maja di Banten, Bandar Kayangan di Lombok, Pontianak di Kalimantan Barat, Sofifi di Maluku Utara, dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara.

Konsep pengembangan kota baru yang direncanakan BPIW bersifat tematik. Dalam konsep tersebut, kota baru memiliki fungsi tertentu yang menjadi basis ekonomi. Maksud dari basis ekonomi adalah potensi yang dimiliki suatu daerah, yang dapat menjadi sumber pendapatan dari daerah itu. Potensi yang dimaksud berupa industri, pariwisata, pusat pemerintahan, maupun pendidikan.

Basis ekonomi ini sangat penting, agar kota baru tersebut dapat terus hidup dan berkembang. Bila hal ini tidak diperhatikan maka kota baru itu sulit berkembang, sebagaimana yang terjadi di negara lain. Contohnya Kota Baru Masdar di Uni Emirat Arab dan Dongtan di dekat Shanghai, China.

Perencanaan kota baru yang dilakukan BPIW juga menekankan keseimbangan populasi dalam suatu kota, antara kalangan kelas atas, menengah, dan bawah. Caranya dengan mengendalikan harga tanah agar tidak terlalu mahal, dan menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Selain itu pola permukiman perkotaan diterapkan secara berimbang dengan komposisi 1:2:3, dimana 3 untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 2 untuk masyarakat berpendapatan sedang, dan 1 untuk masyarakat atas. Dengan cara ini maka 60% kawasan di kota baru tersebut untuk MBR.

Kota baru ini juga dikenal dengan sebutan kota baru publik. Terminologi kota baru publik yang digunakan dalam Buku 3 RPJMN, merupakan kota baru yang direncanakan, disepakati, dilaksanakan, di monitor, dan dikendalikan oleh sektor publik.

Dalam pelaksanaannya, sektor publik punya peran lebih besar dalam pengembangan kota baru publik. Namun demikian tetap ada unsur swasta pada pengembangan kota tersebut, karena publik tidak mungkin melakukan sendiri untuk mengembangkan sebuah kota. Pihak swasta diharapkan dapat berkomitmen untuk menjamin ketersediaan rumah untuk MBR dengan pola hunian berimbang.

Presiden juga mengamanatkan agar negara harus hadir dalam penyediaan perumahan untuk berbagai kalangan pada pembangunan kota baru publik tersebut. Konsep negara hadir, berarti menuntut keterlibatan publik seperti pemerintah pusat (termasuk juga kementerian dan lembaga), pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, BUMN, dan BUMD.

Pengembangan kota baru merupakan upaya untuk mengurangi beban dari kota besar, seperti Jakarta. Sejak tahun 1980-an, pengembangan kota baru dilakukan. Pada saat itu salah satu kriteria untuk menjadi kota baru, yakni seluruh kawasan harus memiliki luas lahan diatas 500 hektar. Kebijakan ini membuahkan hasil, dimana sejak 2010, ada 25 kota baru di Jabodetabek. Namun inisiatif kota baru ini lebih banyak digerakkan oleh pihak swasta, sehingga kota baru seperti Bumi Serpong Damai, Sentul City, dan Alam Sutra, diperuntukkan bagi kalangan menengah keatas.

Membangun kota baru bukan hal yang mudah, karena membutuhkan waktu yang lama, konsistensi dan keterlibatan semua pihak. Pengembangan kota baru ini juga memerlukan payung hukum berupa undang-undang perkotaan, agar pengembangan kota baru terus berlanjut meski terjadi pergantian Presiden. Nantinya undang-undang baru itu dapat berisi beberapa hal seperti konsep, tata cara, dan dukungan kelembagaan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah peran wali kota dalam suatu kota. Untuk itu diperlukan wali kota yang memiliki visi, kapasitas, serta dukungan politik dan passion untuk mengelola kota. Semua aspek tersebut itu harus lengkap dimiliki seorang wali kota sebagai urban manager, yang dapat mengelola suatu kota dengan baik.

Penataan kota juga butuh kerjasama beberapa kalangan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembangan. Kerjasama diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dari para stakeholder tersebut. Dalam kesepakatan itu tertuang tanggung jawab masing-masing pihak.

Kerjasama itu juga harus direalisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan, hingga berakhirnya masa kesepakatan bersama tersebut. Komitmen masing-masing stakeholder dalam melaksanakan kewajibannya, punya peran penting mewujudkan hunian yang terkendali.



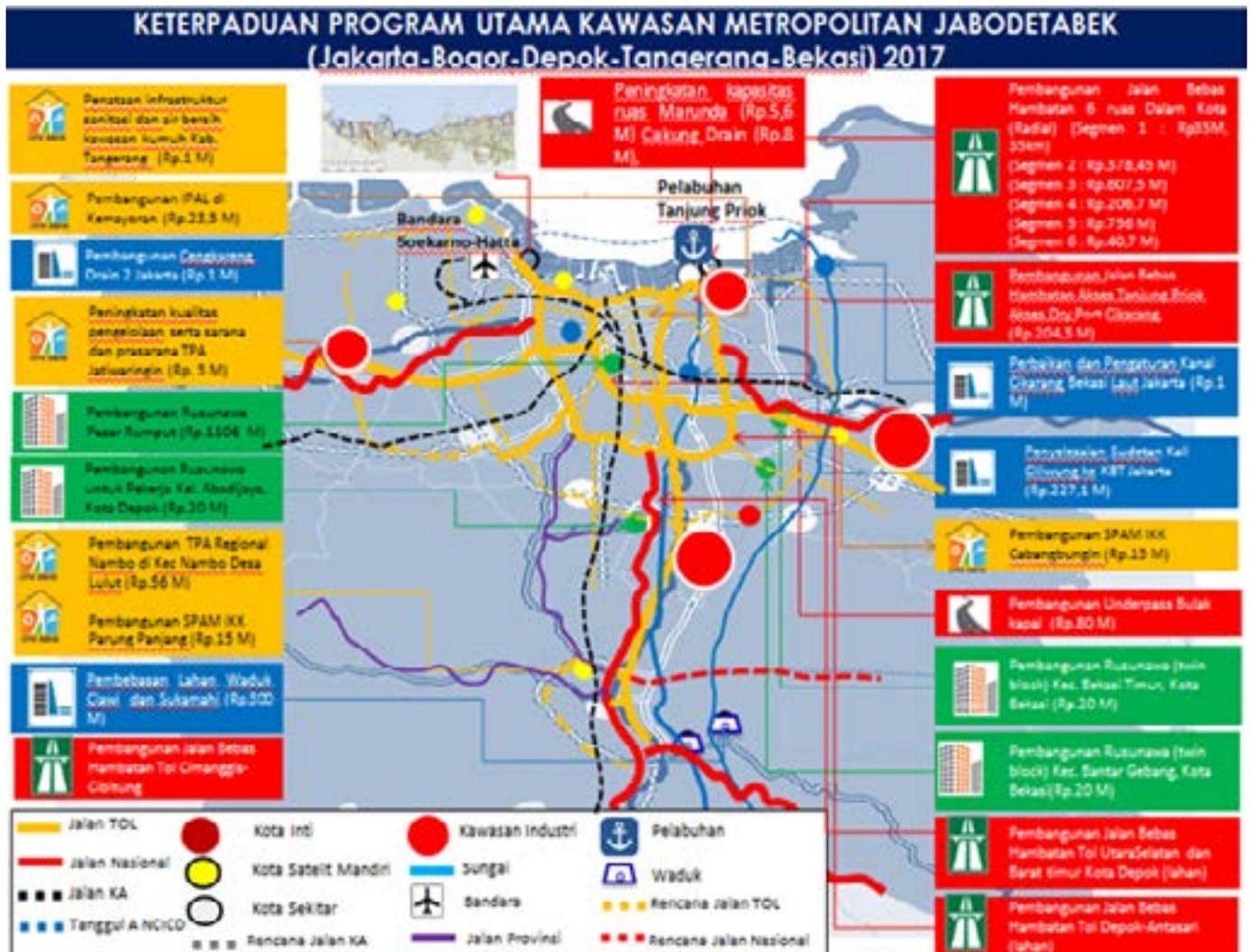
Pembangunan Infrastruktur PUPR Benahi Jabodetabek

Pembangunan infrastruktur terutama sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih menjadi prioritas pemerintah. Hal ini terutama dalam membenahi kondisi infrastruktur di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Kawasan Jabodetabek memiliki peran yang sangat besar bagi kegiatan ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan PDRB lebih dari Rp 1.500 triliun.

Sumber: Dok. PUPR



Jalan Tol Sedyatma, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta



Pada 2012 struktur perekonomian Jabodetabek yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan sekitar, 72,56% perekonomian Jabodetabek masih terkonsentrasi di Kota Jakarta, diikuti Kabupaten Bekasi dengan kontribusi wilayah sebesar 7,51% (Rp 114,3 triliun), dan Kabupaten Bogor sebesar 6,30% Rp 95,9 triliun). Secara nasional wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 18,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Meski berperan dalam perekonomian nasional, namun Jabodetabek memiliki empat persoalan yang menonjol. Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Herman-

to Dardak empat persoalan yang dihadapi kawasan tersebut adalah, pertama, perkembangan permukiman yang tak terkendali

“Dalam pengembangan kawasan perkotaan, sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan infrastruktur yang terintegrasi adalah terciptanya kawasan yang tertata baik struktur fisiknya dan harmoni dengan pola pemanfaatan ruangnya, sehingga kota menjadi aman dan nyaman ditinggali masyarakatnya, produktif dan efisien baik pelayanan internal maupun eksternal serta berkelanjutan,” ujar Dardak.

atau urban sprawl. Kedua, krisis terkait air seperti banjir dan kekeringan, serta terbatasnya suplai air baku. Ketiga, kemacetan lalu lintas dan berbaurnya lalu lintas region-

al dengan lalu lintas lokal dalam kota. Keempat, kemiskinan perkotaan, dimana terlihat dari meluasnya permukiman kumuh. Hal ini terkait dengan tingginya urbanisasi yang meningkatkan jumlah penduduk di perkotaan dalam 4 dekade ini, meningkat 6 kali lipat.

Data Kementerian PUPR menyebutkan jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 21 juta jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 28 juta pada tahun 2010. Bahkan saat ini jumlahnya mencapai 30 juta jiwa, sehingga Jabodetabek merupakan megapolitan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo- Yokohama dengan jumlah penduduk sebanyak 37 juta jiwa.

Untuk mengatasi masalah perkotaan

menuju Bekasi-Cikampek, saat ini sedang dibangun pula jalan tol radial dari Antasari menuju Depok.

Modernisasi jaringan jalan berupa empat lingkaran dan enam radial utama tersebut sekaligus melayani simpul-simpul ekonomi pelabuhan Tanjung Priok maupun Kawasan Industri Cikarang dan Tangerang agar lebih produktif dan efisien, peran transportasi intermoda menjadi vital yang melalui koordinasi Kementerian Perhubungan dan Pemda, akan dibangun Kanal Cikampek-Cikarang-Bekasi Laut, Kereta Bandara Soetta-Halim, dan MRT dari selatan ke utara, maupun dari timur ke barat Jakarta.

Kementerian PUPR, juga telah menyiapkan beberapa program infrastruktur tahun 2017. Seperti penataan infrastruktur sanitasi dan air bersih kawasan kumuh Kabupaten Tangerang, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan DKI Jakarta Zona 1 di Pluit dan Zona 2 di Pantai Indah Kapuk, peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, dan penataan infrastruktur sanitasi dan air bersih kawasan kumuh Kabupaten Bekasi.

Selain itu dilakukan pembangunan IPAL

Skala Kawasan Kota Bogor, dan pembangunan Saluran Pembuangan Air (SPA) serta sarana pengangkutan sampah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta Kota Depok untuk mendukung TPA Regional Nambo.

Terkait masalah air, dari 13 sungai yang memasuki Jakarta telah terbangun Kanal Banjir Barat (KBB) sebagai bypass Sungai

Terkait masalah air, dari 13 sungai yang memasuki Jakarta telah terbangun Kanal Banjir Barat (KBB) sebagai *bypass* Sungai Ciliwung ke barat, Kanal Banjir Timur (KBT) untuk *bypass* dari Sungai Cipinang ke Timur. Agar fungsi penanganan banjir lebih terpadu, saat ini sedang diselesaikan Sodetan Kali Ciliwung ke Sungai Cipinang/ KBT, berupa terowongan bawah tanah.

Ciliwung ke barat, Kanal Banjir Timur (KBT) untuk bypass dari Sungai Cipinang ke Timur. Agar fungsi penanganan banjir lebih terpadu, saat ini sedang diselesaikan Sodetan Kali Ciliwung ke Sungai Cipinang/ KBT, berupa terowongan bawah tanah.

Kemudian, KBT sepanjang 23,5 km dilengkapi jalan untuk sepeda dan jogging serta koridor ruang terbuka hijau (sabuk hijau) dan bangunan yang menghadap kanal dapat

merupakan percontohan pengembangan kawasan di perkotaan lain di Indonesia.

Seiring dengan urbanisasi di Jabodetabek, saat ini sedang dilakukan pula peningkatan kapasitas melalui normalisasi Sungai Pesanggrahan, Sungai Ciliwung maupun Kali Angke serta dimulainya pembebasan Lahan Waduk Ciawi dan Sukamahi. Dilakukan pula

perkuatan tanggul laut existing utara Jakarta sebagai tahapan rencana penanganan terpadu utara Jakarta. Rencana penanganan terpadu itu disebut juga National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Diketahui bahwa NCICD adalah sebuah mega proyek lengkap dengan master plan-nya bagi perlindungan jangka panjang atas wilayah Jakarta dan sekitarnya terhadap banjir yang berasal dari laut. Mega proyek NCICD

melibatkan langsung Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, dan Pemda DKI Jakarta, serta merupakan hasil kerja sama jangka panjang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang secara khusus memfokuskan pada pengelolaan air.

Untuk menghadapi permasalahan terutama banjir dan kemacetan, maka semua ele-



Pembangunan Tanggul A Lokasi Muara Baru, Pluit. Jakarta Utara

Sumber: Dok. PUPR

men infrastruktur seperti jalan dan wilayah permukiman penduduk di monitor dalam sebuah control room. Dengan monitoring ini maka dapat dideteksi bila terjadi hal itu, dan instansi terkait dapat melakukan penanganan secara langsung.

Khusus penanganan banjir dilakukan early warning system atau sistem peringatan dini. Dalam sistem ini dapat diketahui seberapa besar curah hujan yang turun. Hal ini diketahui melalui sensor yang dipasang di sungai-sungai. Dengan sensor ini tercatat secara otomatis jumlah debit air dari sungai yang mengalir ke jalan-jalan. Dengan demikian dapat diperkirakan, dimana saja genangan air atau banjir yang terjadi. Bila telah diketahui lokasi yang berpotensi banjir, maka langsung diberitahukan kepada masyarakat, sehingga dapat dihindari daerah-daerah banjir tersebut.

Kementerian PUPR juga sedang mengembangkan beberapa kota baru publik terutama untuk melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti di Kemayoran maupun Maja, yang berada di sisi Barat Jabodetabek.

Untuk Pembangunan Kota Baru Kemayoran dengan konsep super blok, dimana bangunan didirikan secara vertikal antara lain di Blok C2 dan Blok D10, dilengkapi dengan angkutan umum yang intensif dan tambahan ruang terbuka hijau. Terkait penanganan kawasan kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, direncanakan sebagai bagian dari restorasi sungai. Saat ini juga tengah dibangun rusunawa di Pasar Rumput dan Pasar Minggu.

Pengembangan Kawasan Jabodetabekpunjur

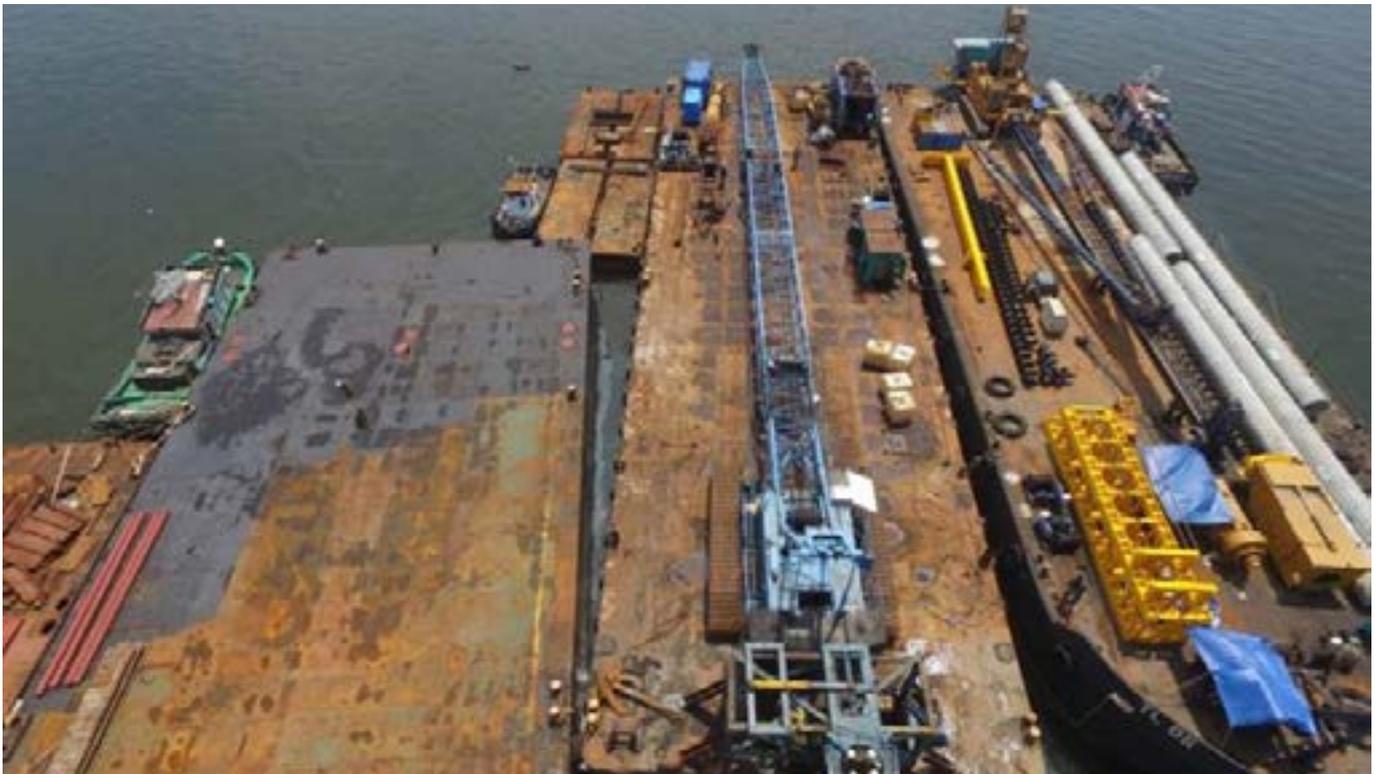
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis pengembangan wilayah dan pemerintah telah menetapkan kawasan Jakarta beserta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau disebut Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Untuk itu, aglomerasi di kota-kota bertetangga menurut Dardak, memang perlu diarahkan membentuk perkotaan polisentris terstruktur dengan Jakarta sebagai kota inti

dan Bodetabek sebagai kota satelit mandiri.

Fungsi dan peran Jabodetabekpunjur adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, nasional, dan internasional. Kemudian sebagai pusat industri pengolahan dan industri kreatif, dan simpul transportasi skala regional, nasional, dan internasional. Kemudian sasaran dari pengembangan kawasan tersebut adalah pertama, menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman. Selanjutnya menjadikan kawasan itu dapat berdaya saing tinggi, dan sasarannya sebagai kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.

Konsep pengembangan Kawasan Jabodetabekpunjur, dibagi dalam tiga fase. Pertama, fase 2017-2019. Pada fase ini dilakukan percepatan terwujudnya daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir. Kemudian akan dilakukan optimalisasi peluang keberadaan program prioritas nasional dalam



Kegiatan Mobilisasi Peralatan di Lokasi Pekerjaan Pengamanan Pantai di DKI Jakarta

Sumber: Dok. PUPR

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR



dan sekitar kawasan.

Kedua, fase 2020-2027. Pada fase ini, akan dilakukan peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir. Kedua, pembangunan konektivitas di antara pusat-pusat (polycentric), dan pemanfaatan bonus demografi melalui pengembangan aktivitas ekonomi pendukung di sepanjang jalur konektivitas tersebut.

Ketiga, fase 2028-2035. Pada fase ini akan dilakukan Peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir. Selanjutnya pada fase ketiga ini, akan dilakukan peningkatan konektivitas di antara pusat-

pusat dan pemanfaatan bonus demografi melalui pengembangan aktivitas ekonomi pendukung di sepanjang jalur konektivitas tersebut.

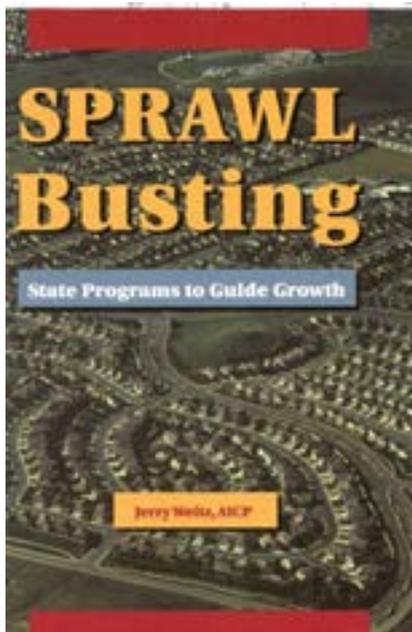
Terkait rencana pengembangan transportasi Jabodetabekpunjur, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan jalan Tol Jakarta Outer Ringroad (JORR) 2 yang akan meling-

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan jalan Tol Jakarta Outer Ringroad (JORR) 2 yang akan melingkari Jakarta bagian luar (lebih luar dari JORR 1) mulai dari Cengkareng hingga Cilincing sepanjang 110,4 km. Pada JORR 2 ini akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi.

kari Jakarta bagian luar (lebih luar dari JORR 1) mulai dari Cengkareng hingga Cilincing sepanjang 110,4 km. Pada JORR 2 ini akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang,

Bogor, Depok dan Bekasi. Rute JORR 2 akan melintasi wilayah Cengkareng - Kunciran - Serpong - Cinere - Jagorawi (Cimanggungis) - Cibitung - Cilincing.

Dalam ultimate 2025, di kawasan tersebut beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun seperti jalan bebas hambatan Setu - Bojongsangu, Serang - Balaraja, Balaraja - Teluknaga - Soekarno Hatta, 6 ruas Dalam Kota (Radial), dan Ciawi - Sukabumi. Selain itu dibangun JORR II. Kemudian juga dibangun tanggul A NCICD, Kanal Cikarang Bekasi Laut Jakarta, Dry Port Cikarang, dan Pipa Transmisi SPAM Regional Bogor. Selanjutnya dibangun Tempat Pembuangan Air (TPA) Jatiwaringin, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan 13 Zona DKI Jakarta, dan TPA Nambo. Selain itu juga dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Penulis : Weitz, J
 Penerbit : Planners Press
 Tempat terbit : Chicago
 Tahun Terbit : 1999
 ISBN : 1884829287
 Jumlah halaman : 415

Weitz mengidentifikasi tiga komponen utama dari perencanaan penggunaan lahan: antar pemerintah (lokal, regional, dan negara); kebutuhan negara untuk perencanaan lokal; dan fungsi dukungan negara (misalnya, hibah, bantuan teknis, dan data).

Program Negara untuk Memandu Pertumbuhan Kota Berpola Menyebar (*Sprawl*)

Pola perkembangan kota yang cenderung *sprawl* (menyebar) dan mengancam area yang lebih besar dari lanskap Amerika membuat perencana dan pejabat publik berbicara tentang potensi manfaat pertumbuhan kota yang cerdas. Beberapa negara sedang merancang pengaturan program baru yang membawa misi manajemen pertumbuhan di tingkat regional dan lokal.

Beberapa negara telah memiliki sejarah panjang dalam menjalankan program penggunaan lahan yang disponsori negara, tapi sampai sekarang pengalaman mereka belum dianalisis atau didokumentasikan. Jerry Weitz menulis ulasan menyeluruh selama tiga dekade tentang upaya pengelolaan pertumbuhan di negara-negara perintis, yaitu Florida, Georgia, Washington, dan Oregon. Sejarah dan analisis program manajemen pertumbuhan di empat negara bagian tersebut antara 1969 dan 1997 dibahas di dalam buku ini. Pengalaman dari negara-negara bagian tersebut memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana untuk merancang undang-undang, mengatur struktur administrasi, dan mendorong pemerintah lokal dan regional untuk berpartisipasi dalam perencanaan penggunaan lahan.

Weitz mengidentifikasi tiga komponen utama dari perencanaan penggunaan lahan: antar pemerintah (lokal, regional, dan negara); kebutuhan negara untuk perencanaan lokal; dan fungsi dukungan negara (misalnya, hibah, bantuan teknis, dan data). Dia mendokumentasikan dan menganalisis berbagai standar minimum untuk rencana penggunaan lahan. Karena ia membandingkan struktur program yang terlepas dari proses politik dan kebijakan, maka analisis dan pengamatannya dapat berlaku di tempat lain.

Buku ini dibahas secara mendalam, diilustrasikan dengan peta, grafik, dan table. buku ini akan menjadi sumber berharga untuk perencana sejarawan, mahasiswa, dan terutama bagi para perencana dan pejabat terpilih yang merencanakan dan melaksanakan program-program negara untuk memandu pertumbuhan di masa mendatang.

Buku ini disusun dalam 13 bab, yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Kerangka Sejarah;
3. Revolusi yang Senyap dalam Perencanaan Negara:1969-1976;
4. Evolusi Perencanaan Penggunaan Lahan Negara Selama Gelombang Kedua: 1980-1988;
5. Perencanaan Penggunaan Lahan Negara Selama Gelombang Ketiga:1989-1997;
6. Struktur Perencanaan Penggunaan Lahan Negara: Peran Negara;
7. Struktur Perencanaan Penggunaan Lahan Negara: Peran Daerah dan lokal;
8. Struktur dan Prinsip Review Rencana;
9. Standar Perencanaan Penggunaan Lahan Lokal;
10. Pembiayaan dan Bantuan Teknis;
11. Kerangka antarpemerintah;
12. Pelajaran, Kritik, dan rekomendasi; dan
13. Kesimpulan, Kualifikasi, dan Keterbatasan.

(Mutri)



Istilah Tentang KOTA

- **Kota:** Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian; cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualistis
- **Kota Baru:** Kota yang dibangun dari nol hingga siap huni, lokasinya dapat di bagian dari kota lama atau di luarnya
- **Kota Baru Penunjang:** Kota baru yang mendukung kota induknya; kota baru memang dikembangkan dalam kaitannya dengan perkembangan suatu kota besar sebagai kota induknya (supporting new town)
- **Kota Berkelanjutan:** Kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang sebagai suatu interaksi antara sistem biologis dan sumber daya, dengan sistem ekonomi dan sistem sosial
- **Kota Besar:** Kota dengan jumlah penduduk antara 500.001 jiwa hingga 1.000.000 jiwa
- **Kota Ekologi:** Kota dengan keseimbangan antara pembangunan, perkembangan kota, dan kelestarian lingkungan; pengertian lebih luas ialah adanya hubungan timbal balik antara kehidupan kota dan lingkungannya.
- **Kota Global:** Kota-kota yang memiliki hubungan erat secara global, seperti kota metropolitan
- **Kota Inti:** Kota yang menjadi pusat kegiatan nasional kawasan perkotaan yang dikelilingi oleh kota-kota satelit
- **Kota Kecil:** Permukiman dengan jumlah penduduk antara 20.000 jiwa hingga 100.000 jiwa (town)
- **Kota Mandiri:** Pusat-pusat permukiman baru yang dikembangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menerpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang (self contained town)
- **Kota Memanjang:** Kota yang dirancang atas prinsip bahwa rute transportasi harus menjadi determinan atau penentu mengenai bentuk kota, pembangunannya diatur pada kedua sisi poros atau jalan utamana (linear city).
- **Kota Mendatar:** Kota yang berkembang meluas secara horizontal (horizontal city)
- **Kota Metropolitan:** Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa; sering disebut juga kota metropolitan
- **Kota Pariwisata:** Permukiman yang dibangun, terutama untuk rekreasi, termasuk kegiatan bersifat fisik, mental dan budaya, umumnya terdapat fasilitas hotel, motel, rumah makan, dan toko cendramata (resort town).
- **Kota Pelayanan :** kota dengan fungsi utama menyediakan berbagai jenis jasa, atau kota yang kehidupan ekonominya terutama ditunjang oleh kegiatan sektor jasa; sektor jasa dapat berupa perhotelan, perdagangan, restoran, perseorangan, transportasi, hiburan, lembaga keuangan, dan pemerintahan (service city)
- **Kota Satelit:** Kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar; secara ekonomi, sosial, administrasi, dan politis bergantung pada kota besar itu.
- **Kota Sedang:** Kota dengan jumlah penduduk antara 100.001 jiwa hingga 500.000 jiwa
- **Kota Taman:** (1) Kota yang dirancang untuk memperbaiki mutu kehidupan kota industri yang dirasakan makin memburuk, dalam besaran yang memungkinkan kehidupan sosial yang utuh, dikelilingi oleh jalur daerah pertanian (2) Kota yang di dalamnya mengandung jalur dan kantong-kantong fasilitas pekarangan hijau ; selain itu, kota tetap menyediakan fasilitas lengkap untuk kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lain (garden city).
- **Kota Tani:** Kota pusat pengumpul hasil pertanian, kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan hasil pertanian (agropolis)
- **Kota Terpadu Mandiri:** Kawasan transmigrasi, pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. **Mutri**

Sumber: Kamus Penataan Ruang



Kerjasama Tidak Berakhir pada Saat Dilakukan Penandatanganan

Basuki Hadimuljono

.....
Menteri PUPR

Bertempat di Kementerian PUPR, Senin, 27 Juni lalu, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja. Sebagaimana diketahui, bahwa Maja merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang akan dinaikkan statusnya sebagai Kota Baru Publik yang mandiri. Penandatanganan juga melibatkan pemerintah daerah yang ada di sekitar Maja seperti Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Penandatanganan ini juga melibatkan pihak pengembang. Penandatanganan tersebut merupakan langkah

percepatan dan juga merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat tersendat pada tahun 1994 lalu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan kerjasama tersebut, tidak berakhir pada saat dilakukan penandatanganan saja, tapi justru menjadi momentum untuk mewujudkan kota baru tersebut sebagai penyanggah Ibukota Jakarta. Berikut petikan wawancara dengan Menteri PUPR tersebut yang diambil dari berbagai kesempatan.

Apa yang akan dilakukan setelah terjadinya Kesepakatan Bersama terkait pengembangan Kota Baru Publik Maja?

Kita bersyukur kehadiran Allah SWT, akhirnya kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan para pengembang, dapat kita tandatangi bersama. Kita bertekad bahwa kerjasama ini tidak berakhir dengan penandatanganan saja, tapi kita harus laksanakan sehingga tidak mengulang sejarah, dimana kesepakatan pengembangan Kota Baru Publik sudah dilakukan sejak tahun 1994, namun sempat tersendat. Kini, kita kembali lakukan kesepakatan bersama, maka kita harus laksanakan tahun ini juga. Jadi harus segera dilakukan hingga berakhirnya berakhirnya perjanjian tahun 2019 mendatang, dan saya yakin kita bisa melaksanakannya. Seperti yang telah disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW, Bapak Hermanto Dardak, bahwa ada target pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan, yakni sepanjang 50 hingga 55 kilometer. Jadi sudah menjadi tugas kami di Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kota baru publik tersebut. Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan akan menterpadukan rencana dan mempercepat implementasi program pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.

Apa yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur jalan tersebut?

Bila ada jalan sepanjang 55 kilometer dan lebar 40 meter, yang akan dibangun, maka kita membutuhkan lahan seluas 200 hektar. Sekarang para pengembang telah menyerahkan lahannya, minimal 100 hektar untuk pembuatan jalan. Dengan demikian, kami bisa segera merencanakan pembangunan jalan tersebut, karena sudah ada minimal 100 hektar lahan yang bisa dibuat untuk jalan.

Sisanya, yakni 100 hektar lagi, merupakan tugas kita bersama untuk menyediakannya, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di sekitar kawasan Maja, yang harus didepan, dan kami mendukung pembangunan Kota Baru Publik Maja berada dibelakang, dengan anggaran yang ada.

Apakah dengan telah diserahkannya 100 hektar oleh pengembang ini, pembangunan sudah bisa dilakukan?

Dengan telah diwakafkannya tanah seluas 100 hektar oleh pengembang untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut, maka pembangunan infrastruktur jalan sudah bisa dilaksanakan. Meski masih dibutuhkan lagi 100 hektar, namun pembangunan tetap berjalan. Kita harus percepat pembangunan infrastruktur, karena sesuai masa perjanjian, maka pembangunan kita lakukan hingga 2019.

Apa manfaat dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang ?

Jadi manfaat kesepakatan ini dapat kita gambarkan seperti ini, bila turunnya Alqur'an di bulan Ramadhan menjadi panduan Umat Islam,

maka penandatanganan ini menjadi panduan kita dalam membangun Kota Maja kedepan. Ini semangat yang harus kita pegang bersama, khususnya bagi yang melakukan penandatanganan. Masa berlaku kesepakatan ini tidak lama. Kita lihat apa hasil yang didapat setelah berakhirnya masa kesepakatan tersebut.

Bagaimana caranya, agar pembangunan Kota Baru Publik Maja dapat terkendali?

Setelah dilakukannya Master Of Understanding atau Mou ini, maka akan disahkan masterplan kota baru publik tersebut. Dengan adanya masterplan, kita harus dapat mengendalikan pembangunan kota. Jadi tumbuhnya kota tidak semaunya saja, akan tetapi harus terkendali dengan baik. Untuk itu diperlukan beberapa hal seperti pengaturan pengendaliannya, pengawasan, dan tata ruang yang disesuaikan dengan masterplan yang kita akan sepakati bersama.

Apakah nanti akan ada badan pengelola Kota Baru Publik Maja?

Hingga saat ini badan pengelola tidak ada. Semua berjalan seperti apa adanya. Semua pihak yang melakukan kesepakatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, diharapkan dapat fokus pada tugasnya masing-masing. Kita juga harus dapat memastikan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk sebuah kota. Tanpa sarana dan prasarana sebuah kota tidak akan berkembang dengan baik.

Apakah adanya jaminan perizinan akan dipermudah?

Dengan adanya kesepakatan bersama, maka saya minta perizinan juga harus segera disederhanakan dan dipermudah

untuk membangun Kota Maja, supaya apa yang kita rencanakan dapat terwujud. Percuma saja dilakukan MoU bila perizinan tidak dipercepat dan disederhanakan. Pemerintah daerah harus menjamin itu, dan sebenarnya pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan. Bila kemudahan sudah diberikan, maka pengembang harus mengikuti prosedur perizinan yang ada.

Maja disebut sebagai 'Kota Baru Publik', apa memang pembangunan Maja ini diarahkan untuk publik?

Bila disebut 'Kota Baru Publik', maka tentunya pembangunan di Maja ini diarahkan untuk publik atau masyarakat, terutama dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Bila tidak ada program untuk perumahan bagi MBR, maka tentunya kita tidak akan membangun kota itu. Jadi pembangunan infrastruktur perumahan untuk MBR itu bersifat mutlak atau wajib untuk dilakukan. Pembangunan Kota Maja ini juga untuk mendukung program pembangunan satu juta rumah. **Hendra/Naufal**

“Kita bertekad bahwa kerjasama ini tidak berakhir dengan penandatanganan saja, tapi kita harus laksanakan sehingga tidak mengulang sejarah, dimana kesepakatan pengembangan Kota Baru Publik sudah dilakukan sejak tahun 1994, namun sempat tersendat. Kini, kita kembali lakukan kesepakatan bersama, maka kita harus laksanakan tahun ini juga”.

A portrait of Hermanto Dardak, a man with a mustache, wearing a blue baseball cap with a yellow logo and sunglasses. He is wearing a yellow and black batik shirt. The background is a blurred green field. On the left side of the page, there is a decorative graphic of blue diagonal lines.

Harmonisasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Kota Baru Publik Maja

Hermanto Dardak

.....
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan 10 kota baru publik, salah satunya adalah Maja. Daerah tersebut merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pengembangan kota baru publik tersebut merupakan amanat RPJMN 2015-2019 dan Renstra PUPR. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Publik Maja 27 Juni lalu, Kementerian PUPR akan melakukan

berbagai pembangunan infrastruktur yang diharmonisasikan atau menyelaraskan dengan pembangunan kawasan di daerah itu. Lalu, pembangunan infrastruktur apa saja yang akan dilakukan Kementerian PUPR dan apa yang menjadi tujuan dari pengembangan kota baru publik tersebut?. Berikut wawancara dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak.

Bagaimana awalnya pemerintah mengembangkan Kota Baru Publik Maja?

Pada awalnya pembangunan Kota Baru Publik Maja dimulai dengan inisiasi pembangunan perumahan oleh developer pada tahun 1994. Maja yang merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini, akan dijadikan sebagai kota penyanggah Jakarta. Kemudian pada tahun 1998, Menteri Perumahan Rakyat mengeluarkan SK yang menetapkan Kota Kekerabatan Maja. Pada saat itu, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kota baru tersebut seluas 19 ribu hektar. Lahan itu berada di Kecamatan Cisoka dan Tiga Raksa di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tenjo di Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak.

Namun pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, sehingga pembangunan perumahan terhenti. Setelah itu dikeluarkan SK Menpera terkait pembentukan tim fasilitasi pengembangan kembali Kota Kekerabatan Maja. Selanjutnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Pada akhirnya, telah dilakukan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding antara pemerintah pusat yang diwakili Kementerian PUPR, pemerintah daerah dan juga para pengembang, 27 Juni lalu. Pengembangan Kota Baru Publik Maja ini tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR.

Seperti apa akses menuju Maja?

Untuk menuju Maja tidak sulit, karena dapat menggunakan kereta api dari Tanah Abang di Jakarta, langsung menuju Maja. Waktu tempuhnya hanya 1,5 jam saja. Dengan kendaraan roda empat, kita dapat menuju ke Maja melalui akses jalan tol dan keluar di Balaraja Barat ke Cikupa dengan waktu tempuh mencapai 2 sampai 2,5 jam.

Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pengembangan Maja?

Pembangunan Jabodetabek sudah berkembang dengan pesat, terutama di bagian barat dan timur. Untuk bagian barat kita sudah membangun jalan tol. Kemudian kawasan industri sudah tumbuh, seperti juga di timur. Hal ini berimplikasi kepada kebutuhan perumahan permukiman semakin meningkat. Kalau kondisi tersebut kita biarkan, maka perkembangannya tidak teratur atau sprawl, dan perkembangan kawasan itu tidak efisien. Permukiman pun akan menjadi mahal.

Supaya efisien, kita perlu mengharmonisasikan atau menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan kawasan. Salah satu kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai

kota baru publik, yaitu kawasan Maja. Kita melihat Maja punya potensi terutama untuk memenuhi kebutuhan permukiman untuk karyawan atau buruh.

Sebetulnya kawasan Maja atau sekarang kita sebut Kota Baru Publik Maja terdiri dari Kecamatan Maja yang berada di Kabupaten Lebak, sebagian masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Pengembangan Maja juga untuk mendukung program satu juta rumah. Adapun maksud dari pengembangan daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama antara para pihak dalam rangka pengembangan Kota Baru Publik Maja dan sekitarnya, guna mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Tujuannya adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di Kawasan Kota Baru Publik Maja dan sekitarnya.

Bagaimana langkah yang dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama?

Setelah penandatanganan, kita menyiapkan *masterplan* dan *development plan*. Kemudian melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Akses ke Maja dengan ROW atau Ruang Milik Jalan sebesar 40 meter, penetapan lokasi untuk pembebasan tanah, dan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan eksisting dan jalan baru, termasuk lahan milik pengembang.

Setelah penandatanganan, kita menyiapkan masterplan dan development plan. Kemudian melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Akses ke Maja dengan ROW atau Ruang Milik Jalan sebesar 40 meter, penetapan lokasi untuk pembebasan tanah, dan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan eksisting dan jalan baru, termasuk lahan milik pengembang. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pembangunan jalan akses ke Maja yang dimulai dari Jalan Nasional di Pamulang hingga Jalan Nasional di Rangkasbitung, pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, beserta fasilitas umum dan sosial. Kita

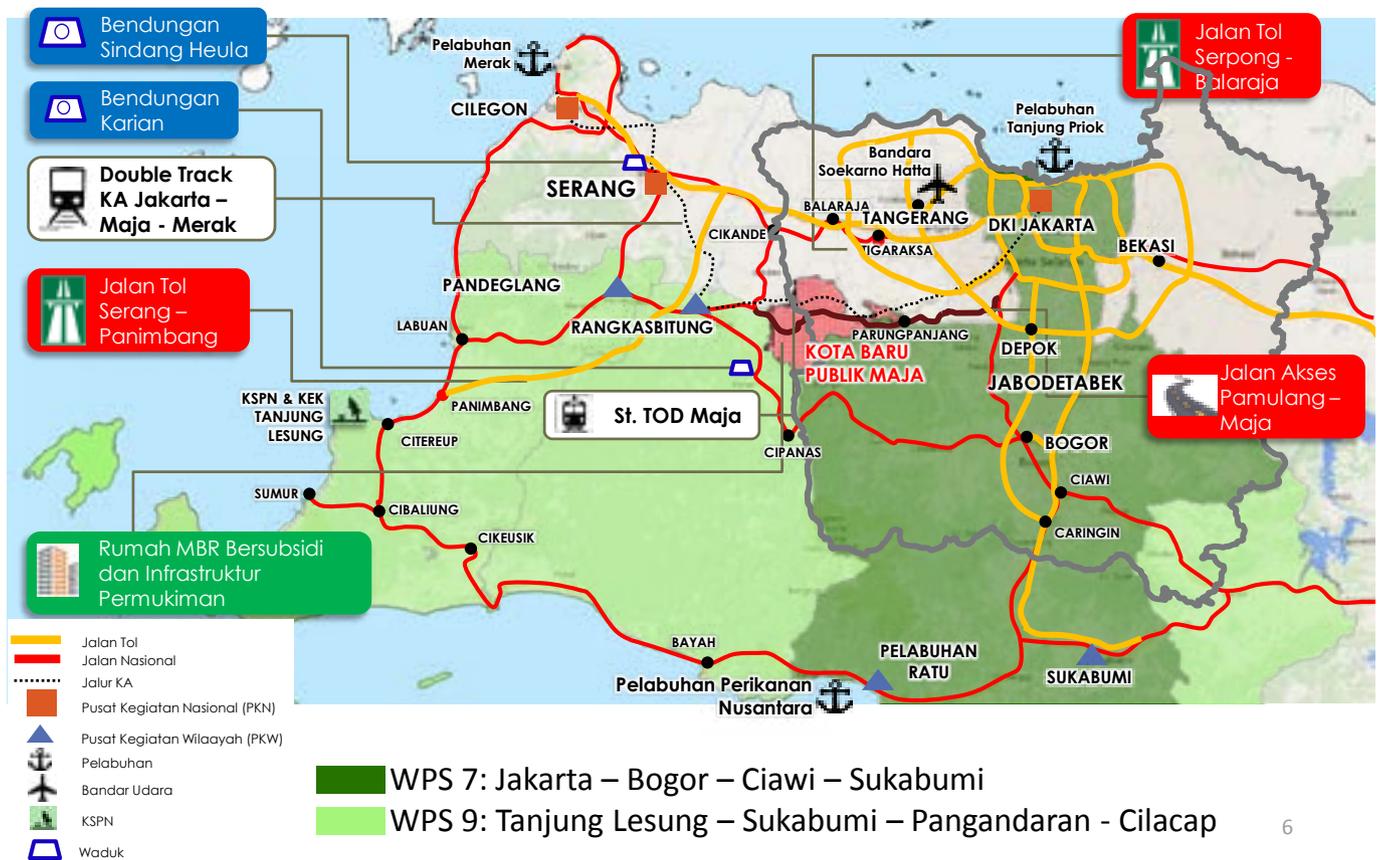
juga melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah bagi MBR bersubsidi dengan pola hunian berimbang.

Dengan jangka waktu kesepakatan bersama hingga tahun 2019 banyak hal yang kita lakukan dengan semua pihak yang telah menandatangani kesepakatan tersebut hingga terwujudnya Kota Baru Publik Maja. Jumlah penduduk di Maja saat ini mencapai sekitar 500 ribu jiwa. Dengan pengembangan menjadi kota baru, maka jumlah penduduk daerah tersebut mencapai 1,5 juta jiwa tahun 2035 mendatang.

Apa peran masing-masing stakeholder dalam mengembangkan Maja ?

Jadi kesepakatan bersama yang telah dilakukan melibatkan pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan pihak pengembang. Dari kesepakatan tersebut telah menetapkan peran masing-masing stakeholder. Selain itu peran semua pihak sesuai masterplan yang kita buat. Masterplan tersebut

Profil Kawasan Kota Baru Publik Maja - Ultimate Program 2025



6

mengharmonisasikan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan. Diharapkan pengembangan kawasan ini dilakukan para pengembang. Sehingga kita harapkan infrastruktur dan kawasannya terbangun, demikian juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya.

Seperti apa pengembangan Maja sebagai Kota Satelit Mandiri ?

Sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra PUPR kita akan mengembangkan 10 kota baru publik. Diantara 10 kota baru publik tersebut, kami sudah menyiapkan enam masterplan. Lokasi masterplan ada di

Pontianak, Sei Mangke, Tanjung Selor, Sofifi, Bandar Kayangan, dan Maja.

Pengembangan Maja ini sudah mulai dilakukan, seperti untuk jalur kereta api saja, misalnya, sudah menyambung hingga Maja. Kemudian lokasi prioritas di Maja adalah pusat permukiman baru, yang tentunya layak huni sebagaimana mestinya sebuah Kota Satelit Mandiri.

Untuk tahun ini kita melakukan *feasibility study* atau studi kelayakan untuk infrastruktur jalan. Pembangunan Waduk Karian sedang berjalan, demikian juga dengan Pembangunan Waduk Sindangheula.

Pengembangan kota satelit ini bagian dari struktur Megapolitan Jabodetabek. Upaya ini terutama untuk mencegah terjadinya urban sprawl atau permukiman tidak terkendali.

Untuk ibukota dari Kota Baru Publik Maja membutuhkan lahan seluas 10 ribu hektar. Secara keseluruhan luas dari Kota Baru Publik Maja ini mencapai 18.200 hektar. Kita berharap lahan seluas itu dapat terisi dengan berbagai sarana dan prasarana sebuah kota baru.

Melalui sinergi dari berbagai pihak, kita berharap kota baru publik tersebut dapat diwujudkan, termasuk juga pengembangan permukiman untuk mendukung program sejuta rumah.

Seperti apa realisasi dari pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah pada pengembangan Maja?

Didalam Renstra PUPR kita menetapkan 35 WPS, dan didalamnya terdapat 97 kawasan, salah satunya Kota Baru Publik Maja. Untuk menunjang pengembangannya, dilakukan pembangunan infrastruktur jalan. Sehubungan dengan hal itu sudah ditandatangani kesepakatan

pembangunan jalan dari Serpong ke Balaraja. Selanjutnya untuk pembangunan jalan dari Serang menuju Panimbang sudah memasuki proses lelang atau tender.

Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, maka diharapkan akan terjadi komplementer atau saling melengkapi antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah. Selain itu pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang ada, akan jauh meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas Utara-Selatan, serta mengurangi waktu tempuh. Pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Satelit Mandiri Maja. Untuk itu kami lakukan sinkronisasi program, dimana kami koordinasikan program dengan lintas sektor baik secara vertikal maupun horizontal.

Nantinya Kota Baru Publik Maja akan menjadi pusat pertumbuhan di sebelah barat yang akan didukung dengan jalan yang sedang kita bangun dan juga akses kereta api, yang bisa berperan sebagai tulang punggung kawasan tersebut. Dengan dibangunnya kota baru tersebut infrastruktur yang ada akan semakin baik seiring dengan empat jalan lingkar yang dibangun di kota inti Jakarta dan bodetabek. Salah satu dari empat jalan lingkar yang dibangun menuju Maja.

Pembangunan infrastruktur seperti apa yang dilakukan di Maja pada tahun 2016 ?

Untuk tahun ini kita melakukan feasibility study atau studi kelayakan untuk infrastruktur jalan. Pembangunan Waduk Karian sedang berjalan, demikian juga dengan Pembangunan Waduk Sindangheula. Kemudian untuk Jalan Tol Serang-Panimbang sedang dalam proses pelelangan. Sedangkan untuk Jalan Tol Serpong Balaraja sudah dilakukan penandatanganan kontrak dengan pihak kontraktor. Selain itu juga sedang dilakukan pra feasibility study untuk pembangunan infrastruktur Jalan Strategis Pamulang-Serpong-Setu dan Parung Panjang-Maja sepanjang lebih dari 58,35 km. Dalam pengembangannya, Maja juga kita rancang sebagai kota cerdas yang nyaman. Hal ini kita tuangkan dalam masterplan. Pada sekitar Maja, juga banyak kawasan industri dan juga pelabuhan.

Bagaimana pula rencana pengembangannya Tahun 2017?

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2016 dilanjutkan pada tahun 2017 seperti pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian. Sedangkan pembangunan jalan tol, dalam proses penyediaan lahan, seperti Serpong-Balaraja Seksi 1 dan Serpong-Legok seksi 2 dan Kunciran- Serpong. Selain itu juga akan dilakukan rehabilitasi Mayor Cikande-RangkasBitung Kabupaten

Lebak sepanjang 2,2 km. Kemudian akan dilakukan peningkatan dan pembangunan jalan Pamulang-Kota Baru Maja sepanjang lebih dari 58,35 km. Untuk pembangunan rumah berupa pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bersubsidi dan infrastruktur permukiman, dan pembangunan rumah swadaya Provinsi Banten sebanyak 1.500 unit.

Inilah upaya kita untuk memadukan pembangunan kawasan dengan pembangunan infrastruktur. Pengembangan wilayah Jabodetabek baik di sisi barat maupun timur telah membangun kegiatan industri yang membawa implikasi meningkatnya kebutuhan perumahan, terutama untuk karyawan dan buruh. Kita upayakan pembangunan perumahan di kawasan ini dilakukan secara berimbang. Hal ini merupakan esensi dari kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani beberapa pihak yang terdiri dari unsur pemerintah pusat.

Terkait kawasan timur di Cikarang telah dilakukan kesepakatan bersama untuk membangun kawasan industri. Kesepakatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan tujuh pengembang.

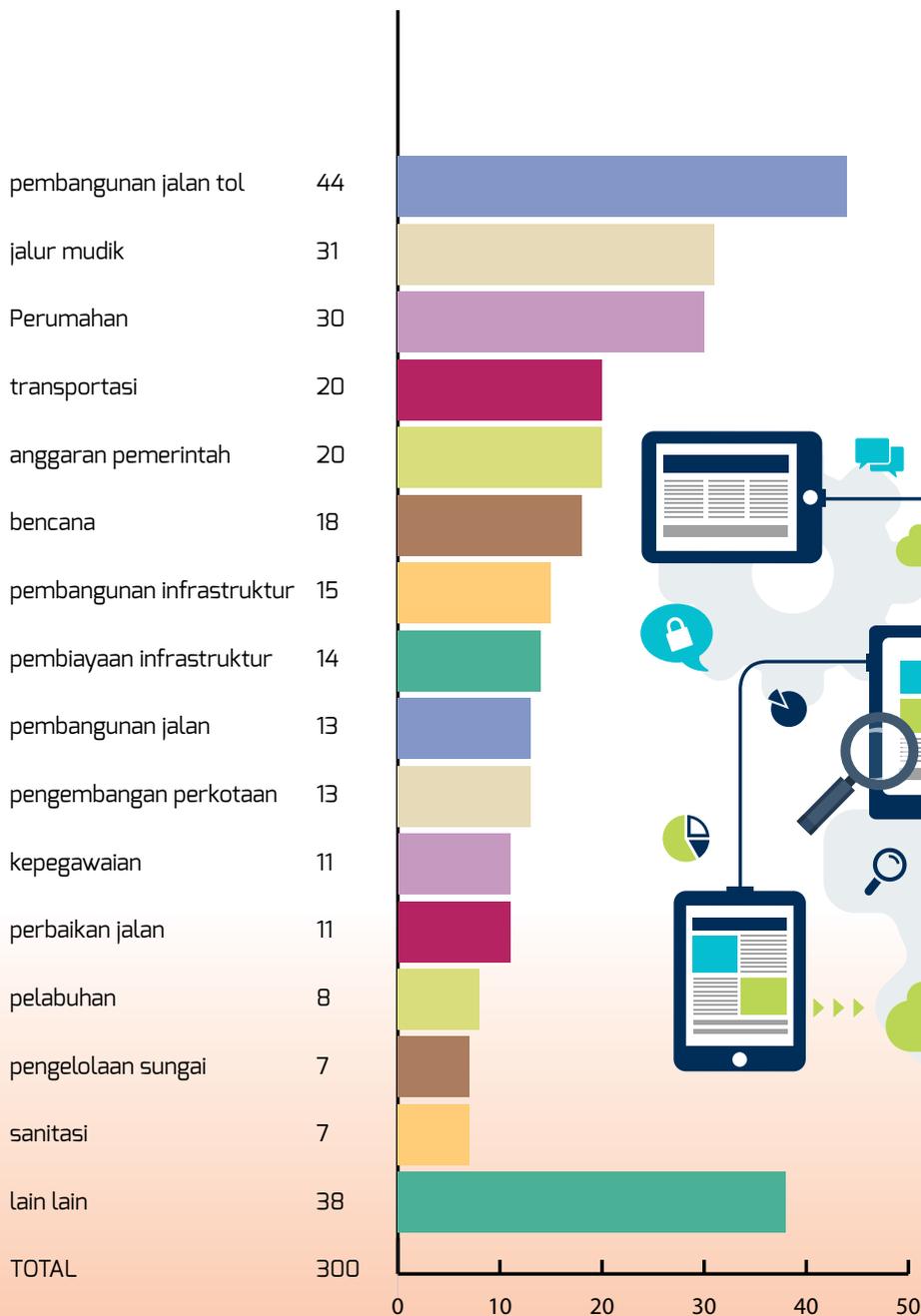
Apa harapan Bapak kedepan setelah dilakukannya kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Maja?

Diharapkan dengan kesepakatan ini akan menterpadukan dan mempercepat implementasi program infrastruktur dan pengembangan kawasan. Kemudian, dengan melibatkan pihak swasta dalam kesepakatan tersebut, maka kita harapkan dapat menggerakkan anggaran dari swasta, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Dengan pola ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran dan mempercepat perwujudnya pengembangan Kota Baru Publik Maja. Kita berharap Maja dapat menunjang Megapolitan Jabodetabek dan dapat mencegah terjadinya urban sprawl. Selanjutnya dengan pengembangan Maja dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya kota baru publik tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. **Hendra/Naufal**

Jumlah penduduk di Maja saat ini mencapai sekitar 500 ribu jiwa. Dengan pengembangan menjadi kota baru, maka jumlah penduduk daerah tersebut bisa mencapai 1,5 juta jiwa tahun 2035 mendatang.

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, selama bulan Juni 2016. Total ada 300 berita dari 7 media koran periode 1 Juni – 31 Juni 2016.





Berita yang Menarik:

1. **Koran Republika** - (halaman 5), Rabu 1 Juni 2016: Kemenpupera mengumpulkan sejumlah pakar guna memperbarui peta gempa Indonesia 2016. Ada beberapa sumber gempa baru, yaitu sesar Kendeng sepanjang Jatim.
2. **Koran Kompas** - (halaman 4), Rabu 1 Juni 2016: Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta harus dijadikan sistem dalam mengembangkan kawasan industri di Indonesia.
3. **Koran Kompas** - (halaman 24), Rabu 1 Juni 2016: Penyediaan air bersih yang mencukupi menjadi masalah bagi hampir semua kota besar di dunia.
4. **Koran Investor Daily** - (halaman 17), Kamis 2 Juni 2016: Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 Triliun untuk membangun sekitar 6.002 unit rumah khusus di seluruh Indonesia.
5. **Koran Tempo** - (halaman 24), Selasa 7 Juni 2016: Hanya kota yang berbatasan dengan Jakarta yang kesenjangan sangat jauh.
6. **Media Indonesia** - (halaman 25), Rabu 8 Juni 2016: Pemerintah akan mengoperasikan enam ruas tol di pulau Jawa untuk memperlancar arus mudik dan balik lebaran tahun ini.
7. **Media Indonesia** - (halaman 1), Jumat 10 Juni 2016: Mewujudkan Indonesia sentris bukan perkara mudah. Pola pembangunan wilayah dan ekonomi bangsa ini sudah amat lama terkonsentrasi hanya di Jakarta dan pulau Jawa.
8. **Bisnis Indonesia** - (halaman 7), Jumat 17 Juni 2016: Kementerian PUPR berencana untuk mengadakan pelelangan potensi listrik di 65 bendungan yang akan dibangun hingga 2019 kepada swasta.
9. **Bisnis Indonesia** - (halaman 27), Jumat 17 Juni 2016: Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah sejak 2015 terus bergulir. Enam bulan berjalan sepanjang 2016, program yang dicanangkan sebagai kebangkitan pasar properti ini nyatanya tak membuahkan hasil memuaskan.
10. **Media Indonesia** - (halaman 20), Selasa 21 Juni 2016: Infrastruktur dan moda transportasi yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas masih menjadi keluhan.

Kerja Sama Antar Sektor Memaksimalkan Pembangunan Infrastruktur

Kerja sama antar sektor punya peran penting dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Bahkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat bila semua pihak melakukan kerja sama yang erat. Demikian disampaikan Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Brawijaya saat membuka diskusi pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur wilayah di Mataram, (3/6). Brawijaya membuka acara tersebut mewakili Sekretaris BPIW.

Kegiatan yang diadakan oleh Sekretariat BPIW ini untuk menginisiasi pengembangan kerja sama melalui proses identifikasi prospek kerja sama, pemetaan stakeholder terkait, perancangan mekanisme dan bentuk kerja sama khususnya dalam pengembangan infrastruktur wilayah,

Lebih lanjut Brawijaya menegaskan Kementerian PUPR akan terus membangun kerja sama dengan berbagai kalangan baik pemerintah daerah (pemda), dunia usaha, maupun sektor lain seperti pariwisata dan perhubungan.

"Pencapaian hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat maksimal, bila kita semua membangun kerjasama yang erat. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah," ucap Brawijaya.

Dikatakannya dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait keterpaduan infrastruktur, Kementerian PUPR termasuk BPIW, tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menjalin kerja sama dengan pihak lain merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Brawijaya juga menuturkan, Kementerian PUPR juga perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk dapat mendorong pertumbuhan di kawasan-kawasan strategis,

Pencapaian hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat maksimal, bila kita semua membangun kerjasama yang erat. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah

diantaranya 10 Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya kawasan Mandalika yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Saat memberikan paparannya, Direktur Pengembangan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Edwin Darmasetiawan menyampaikan bahwa strategi membangun daerah terpencil akan memberikan satu harapan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini dari beberapa hotel yang dibangun di Mandalika, terdapat 1.500 kamar. Direncanakan jumlah kamar hotel tersebut akan mencapai 5 ribu kamar di tahun 2019 mendatang. Hal ini akan menyerap 7.500 tenaga kerja. Dari pembangunan dari hotel dan restoran menurutnya akan meningkatkan pendapatan

daerah sekitar Rp 300 milyar setiap tahunnya. "Untuk mendukung pencapaian tersebut maka dibutuhkan bantuan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yang akan membawa investasi sehingga dapat mendorong pendapatan daerah," ucapnya.

Pembicara yang lain, Kasubdit Strategi dan Evaluasi Amenitas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Mugiyanto mengungkapkan bahwa dalam membangun destinasi wisata, saat ini menggunakan strategi 3A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas serta Amenitas. Strategi 3A ini membutuhkan dukungan

Kementerian PUPR berupa penataan lingkungan dan bangunan cagar budaya. Selain itu, pembangunan dan perawatan jalan, jembatan dan lingkungan permukiman/penataan bangunan menuju dan dilingkungan destinasi pariwisata, serta penyediaan layanan air bersih untuk fasilitas umum. Kemudian Kementerian PUPR juga diperlukan dukungannya terkait pembangunan sistem pembersihan air kotor, sampah, dan sanitasi di daerah pariwisata.

Turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, Yusron Saadi, Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Chairul Muslih, dan Analis Bidang Sosial Budaya dan Hukum Internasional, Dewan Ketahanan Nasional, Hadian Ananta Wardhana.

Saat menutup kegiatan tersebut, Kasubbag Kerja Sama Sekretariat BPIW Indra Maulana, menyatakan hasil kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi nyata dalam memaksimalkan kerjasama antar sektor, sehingga pengembangan infrastruktur berbasis wilayah dapat benar-benar berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat. **Adn/infoBPIW**



Hadian A. Wardhana, analisid bidang Sosial dan Budaya Internasional, Dewan Ketahanan Nasional selaku nara sumber acara ini

Sumber: Dok BPIW

BPIW Lakukan Koordinasi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Media Informasi



Dadang Rukmana, membuka Rapat Koordinasi dan Pemaparan hasil Assesment Website dan Bank Data BPIW

Sumber: Dok BPIW

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan Rapat Koordinasi dan Pemaparan hasil Assesment Website dan Bank Data BPIW, di Bandung, Kamis (16/6). Kegiatan assetment tersebut dilakukan oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan media informasi BPIW.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konsinyasi Pengelolaan Website dan Bank Data BPIW Tahun Anggaran 2016. Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut diantaranya hasil uji keamanan website dan bank data BPIW, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan media informasi BPIW.

“Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang keamanan data yang ada dalam website kita. Data dan substansinya juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat membuka acara tersebut.

Dadang juga menjelaskan bahwa BPIW ingin membuat bank data yang terdiri dari tiga fase, yaitu data dasar yang berguna untuk pengembangan infrastruktur wilayah,

Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang keamanan data yang ada dalam website kita. Data dan substansinya juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana

data infrastruktur, serta data yang terkait dengan semua output yang dihasilkan BPIW.

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan website hanya merupakan satu instrumen untuk memudahkan, namun harus jelas dalam memilah mana data yang bisa dipublish. Ia juga menegaskan tentang pentingnya sebuah bank data, karena data merupakan sebuah keharusan. “Tanpa

adanya data dan informasi, kita tidak bisa bekerja cepat,” imbuh Dadang.

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Rema Suwenda yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dalam membuat bank data, maka data-data serta rencana pemrograman sudah harus ada, jangan sampai bank data tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu kontennya harus diperhatikan, serta harus diupdate secara rutin.

Sehubungan dengan akan segera dikeluarkannya peraturan tentang e-government, menurut Rema kedepan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus mengikuti aturan tersebut. E-government merupakan bisnis manual yang dibuat secara elektronik, termasuk didalamnya pengembangan sistem dan pengembangan networking. “Nantinya pengembangan website Kementerian akan menggunakan prinsip one data, one map, one management” ucap Rema. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri para staf yang merupakan masing-masing perwakilan dari empat pusat di lingkungan BPIW. **Adn/InfoBPIW**

Konsensus *Stakeholder* Dibutuhkan Dalam Pengembangan Kawasan Terpadu Pariwisata Nasional

Perencanaan pengembangan kawasan terpadu pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dapat diwujudkan dengan cara membuat konsensus antar stakeholder di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Stakeholder tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, saat menjadi salah satu pembicara pada Round Table Discussion (RTD) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta, (23/6). Diskusi itu mengambil tema Pengembangan Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi.

Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa perencanaan tersebut dapat pula diwujudkan dengan cara identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, seperti bandara, jalan, air dan



Sumber: Dok BPIW

sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas. Selain itu perlu disiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu dengan membuat master plan untuk Kawasan Pariwisata Strategis.

Menurut Dardak, dalam pembangunan pariwisata nasional terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi bersama-sama, salah satunya adalah infrastruktur pariwisata. Selain itu, fasilitas pendukung pariwisata perlu dikelola secara terpadu. Institusi yang terkait pengembangan dan

manajemen kawasan pariwisata, juga perlu dikelola dengan baik. "Perlu adanya pengembangan institusi dan dukungan untuk menterpadukan para stakeholder dalam mencapai target pariwisata nasional," jelas Dardak.

Koordinasi antar kementerian atau lembaga untuk pengembangan kawasan pariwisata strategis menurut Dardak, diperlukan untuk menyediakan mekanisme dan prosedur di tingkat nasional dan lokal, menyiapkan strategi replikasi untuk kawasan

pariwisata strategis yang potensial, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Dardak memberikan gambaran skenario konektivitas pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba melalui WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Dardak menjelaskan, saat ini sedang dibangun tulang punggung dari WPS tersebut berupa jalan tol yang menghubungkan Medan menuju Sibolga dan Medan menuju Pekanbaru.

“Untuk ruas Medan menuju Tebing Tinggi saat ini sedang dibangun jalan tol sepanjang 54 km yang akan menghemat waktu yang semula dua jam, maka dengan adanya jalan tol ini akan menghemat waktu hingga 40 menit,” jelas Dardak.

Adapun saat ini sedang diusulkan untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 35 km yang akan menghemat waktu hingga 30 menit yang semula memakan waktu 1 jam 40 menit menggunakan jalan nasional. Kemudian,

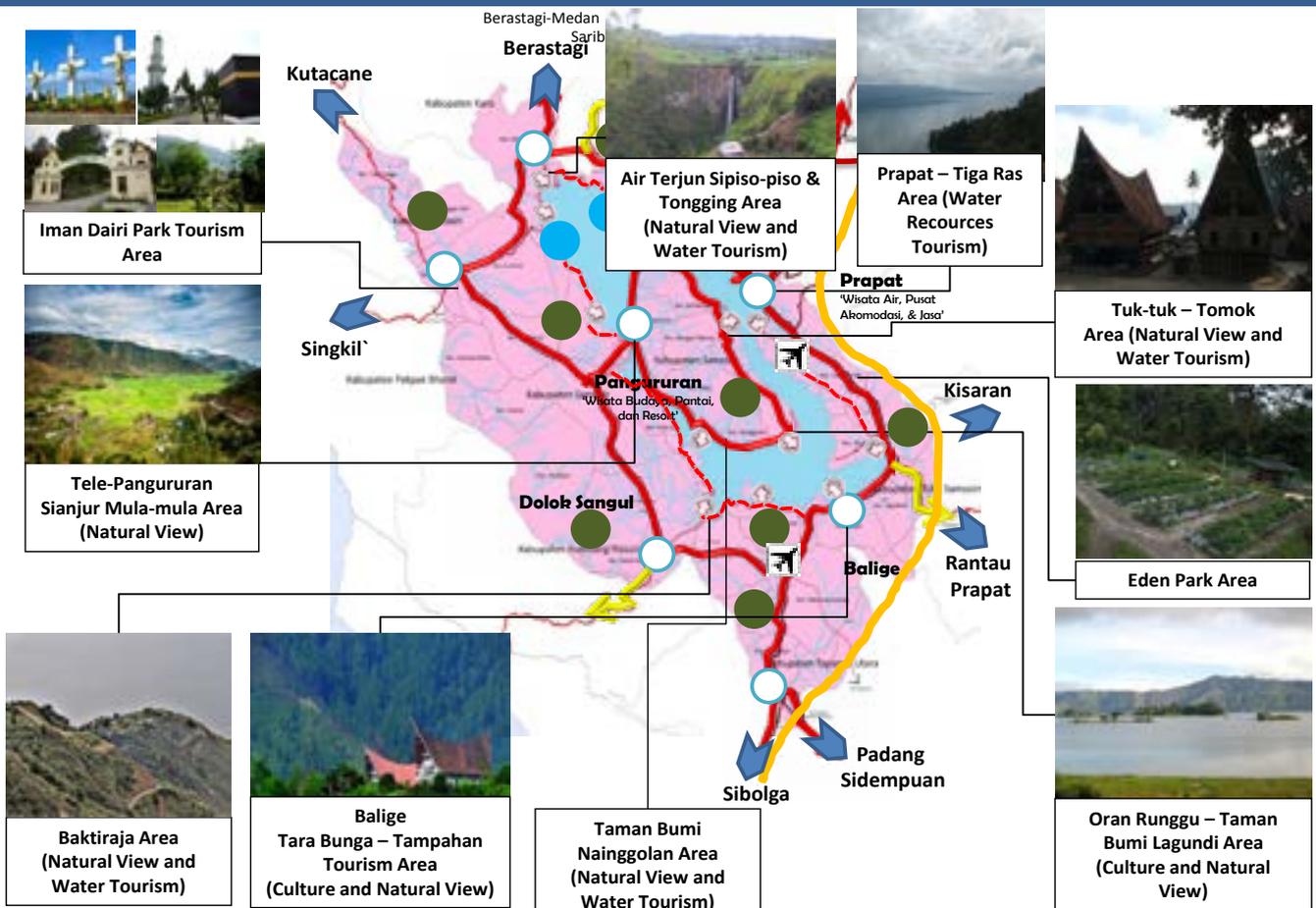
Perlu adanya pengembangan institusi dan dukungan untuk menterpadukan para stakeholder dalam mencapai target pariwisata nasional

pembangunan Jalan Tol Pematang Siantar menuju Parapat sepanjang 27 km yang akan menghemat waktu hingga 20 menit, yang semula memakan waktu selama 1 jam 30 menit menggunakan jalan nasional.

Sebelumnya Penasehat Menteri Pariwisata, Sapta Narwendar mengatakan bahwa terdapat empat strategi dalam revitalisasi pariwisata budaya untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertama, penerapan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) dalam pengembangan destinasi pariwisata budaya. Kedua, pengembangan kluster pariwisata berbasis keunggulan budaya masyarakat. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur destinasi wisata dan keempat, mengembangkan pengelola destinasi terpadu yang melibatkan peran masyarakat, swasta dan pemerintah.

INI/InfoBPIW

EXISTING TOURISM OBJECTS AND DESTINATIONS IN DANAU TOBA STRATEGIC AREA



Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Kota Produktif Melalui Tata Kelola yang Baik



Hermanto Dardak menyampaikan konsep *network cities*

Sumber: Dok. BPIW

Beberapa kota di dunia menjadi tulang punggung yang memfasilitasi kota-kota di sekitarnya untuk tumbuh menjadi *network cities*. Beberapa diantaranya yakni Tokyo-Osaka mempunyai Shinkansen sebagai tulang punggung yang memfasilitasi kota-kota di sekitarnya. Selain itu ada koridor Boston - Washington yang memiliki jalur kereta, jalan raya dan pelabuhan yang saling terhubung.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR sekaligus Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human (EAROPH), Hermanto Dardak menyatakan saat ini, konsep tersebut dilakukan Kementerian PUPR dengan wilayah pertumbuhan di Indonesia. Tujuannya, agar kawasan perkotaan, Kota Baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dapat saling terhubung melalui backbone berupa akses. Harapannya jika kawasan-kawasan tersebut saling terhubung, infrastruktur akan lebih murah, dan menjadi kota yang produktif dengan tata kelola yang baik.

Hal itu disampaikan Dardak pada acara yang diselenggarakan oleh BPIW bersama EAROPH pada Professional Forum dengan tema "Mendorong Kota Produktif dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola yang Baik" di Jakarta, Senin (13/6).

Dardak juga menerangkan bahwa negara dengan urbanisasi yang tinggi juga biasa memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan efisiensi, nilai tambah, dan produktivitas

secara bersamaan. Dalam mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan perencanaan, pemrograman dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah, yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Konsep WPS mendorong kota-kota Indonesia untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing kota-kota tersebut dalam konteks regional dan global," tutur Dardak.

"Konsep WPS mendorong kota-kota Indonesia untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing kota-kota tersebut dalam konteks regional dan global," tutur Dardak

Saat ini kota-kota di Indonesia dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah yang secara bersamaan memenuhi tuntutan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan pengembangan wilayah, sehingga kota-kota tersebut tidak hanya menjalankan fungsi internal, tapi sekaligus memantapkan fungsi eksternalnya.

Menurut Dardak BPIW juga berupaya mendorong agar momentum urbanisasi

menjadi suatu nilai tambah bagi perkotaan. "Urbanisasi itu sesuatu yang tidak harus dihindari, tapi perlu di manajemi, agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun perkotaan yang inklusif," kata Dardak

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, Lana Winayati mengungkapkan pentingnya penanganan urbanisasi dengan perspektif keberlanjutan (*sustainability*).

"Pembangunan perkotaan harus dilihat secara holistik, resiliensi dan *sustainability*," ucap Lana.

Sekretaris Jenderal EAROPH, Norliza Hashim, menambahkan dalam membangun perkotaan yang kompetitif, dibutuhkan juga pemerintah yang baik. "Terkadang karena ingin cepat membangun perkotaan yang kompetitif, kita seringkali melupakan aspek *good governance*," ujar Norliza.

Penyelenggaraan Profesional Forum ini bertujuan menghimpun masukan atau saran untuk menuju Preparatory Committee (PrepCom) 3 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 25-27 Juli 2016 mendatang. PrepCom3 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju UN Conference On Housing And Sustainable Urban Development (Habitat III) di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016. PrepCom3 bisa dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mendorong lahirnya solusi penanganan masalah perkotaan. **INI/InfoBPIW**

BPIW Lakukan Ekspos Tugas Belajar dan Penyerahan SK Pegawai Negeri Sipil



Dadang Rukmana saat memimpin acara Ekspos Tugas Belajar dan Penyerahan SK Pegawai Negeri Sipil

Sumber: Dok BPIW

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan ekspos hasil tugas belajar para PNS di Jakarta, Senin (20/6). Kegiatan ekspos tersebut dilakukan oleh 12 orang yang telah tugas belajar yang sudah menyelesaikan tugas belajarnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Acara ini juga diisi dengan penyerahan SK PNS bagi 35 CPNS formasi umum dan K-2 di lingkungan BPIW Kementerian PUPR. Saat membuka kegiatan tersebut Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana meminta agar PNS baru dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. "Dengan peningkatan kapasitas dari PNS, maka dapat meningkatkan performance BPIW," ujar Dadang.

Selain itu Dadang menyatakan PNS baru dapat mengambil ilmu maupun pengalaman dari para senior yang telah memaparkan hasil dari tugas belajarnya itu. Selain itu

menurutnya ekspos dari PNS tersebut dapat dijadikan masukan untuk bekerja di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya di BPIW.

"Pemaparan hasil tugas belajar tentu

Sumbangsih pemikiran khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi core utama Kementerian PUPR merupakan hal yang sangat dibutuhkan

akan menjadi masukan berharga bagi Kementerian PUPR, khususnya BPIW. Sumbangsih pemikiran khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi core utama Kementerian PUPR merupakan hal yang sangat dibutuhkan" tutur Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang

juga menyatakan bagi PNS yang belum melaksanakan tugas belajar, dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu, sehingga bila ada kesempatan, dapat mengikutinya dengan baik. "Persiapan perlu dilakukan, terutama bagi PNS-PNS baru, setidaknya dalam kurun waktu dua tahun menjadi PNS, diharapkan sudah bisa mengikuti tugas belajar, tapi kalau bisa lebih cepat, itu lebih baik," ucap Dadang.

Salah satu peserta ekspos tugas belajar, Rahindro menyarankan agar para PNS baru tidak ragu untuk mencoba dan mengikuti program-program beasiswa yang ada. Dalam paparannya, para peserta ekspos tugas belajar tersebut menjelaskan beberapa hal seperti tentang kegiatan selama tugas belajar, apa yang dipelajari, apa yang didapat, dan apa yang bisa dibawa ke pekerjaan sehari-hari dari hasil studi tersebut. **Bril/Hen/infobpiw**

Kepala BPIW: WPS adalah Upaya Mengurangi Ketimpangan Kawasan Barat dan Timur Indonesia



Sumber: Dok BPIW

Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan pendekatan berbasis kewilayahan tersebut, seperti pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, di NTT juga dibangun Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, serta dikembangkan pula infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjawab pertanyaan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PAN NTT I, Syahrulan Pua Sawa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Selasa, (21/6).

Pada kesempatan itu, Dardak juga menanggapi komentar dari Fraksi PDIP Sulawesi Tengah, Rendy M. Affandy yang setuju dengan adanya organisasi perencanaan dan pemrograman seperti BPIW. Menurut Dardak di level nasional, fungsi perencanaan pembangunan nasional berada pada Badan Perencanaan

Nasional (Bappenas), dimana perannya melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Sedangkan, BPIW kata Dardak, merupakan unit organisasi baru pada Kementerian PUPR yang bertugas menyusun kebijakan

Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

teknis dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan keterpaduan infrastruktur dan membangun sinkronisasi program pada bidang infrastruktur PUPR.

"Kebutuhan infrastruktur difokuskan pelaksanaannya pada WPS, antar WPS dan kawasan-kawasan strategis lainnya yang berada di dalam WPS, seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Kawasan Strategi

Pariwisata Nasional atau KSPN, Kawasan Pengembangan. Pariwisata Nasional atau KPPN, Kota Terpadu Mandiri atau KTM, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan metropolitan dan kota baru, Agropolitan dan Minapolitan, serta outlet berupa pelabuhan dan bandar udara," urai Dardak.

Terkait pertanyaan mengenai sinergitas pembangunan Jembatan Madura dengan perekonomian Surabaya – Madura yang diajukan oleh Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS Jawa Timur I, Dardak menjelaskan bahwa perlu adanya pembangunan lingkaran timur dan radial di Surabaya sehingga pambauran fungsi menjadi tinggi. "Untuk itu perlu adanya percepatan pembangunan jalan lingkaran dan radial untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan metropolitan Gerbangkertosusila atau Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo dan Lamongan, sekaligus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan layak huni Kota Surabaya dan sekitarnya," tutur Dardak.

Khusus mengenai BPIW Anggota DPR, Rendy M. Affandy berharap BPIW kedepan akan lebih produktif dengan kewenangan yang dimiliki BPIW dalam hal menterpadukan pembangunan infrastruktur. (Ini/infobpiw)

BPIW Lakukan Finalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan *Quick Wins*



Dadang Rukmana saat melakukan Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins

Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan *Quick Wins* di Jakarta, Kamis, (23/6). Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW Dadang Rukmana mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal BPIW.

"FGD ini untuk memfinalkan rencana aksi kegiatan yang tertuang dalam Draft Road Map Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan membahas *Quick Wins* untuk BPIW," ujar Dadang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan Road Map BPIW mengambil base line dari hasil assesmen kesiapan organisasi, kerangka program dan kegiatan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

Selain Road Map menurut Dadang, Reformasi Birokrasi BPIW juga mencakup *Quick Wins*, yang diarahkan sebagai salah satu instrumen dalam mempercepat pencapaian kepercayaan masyarakat,

dimana di BPIW jenis pelayanan bersifat tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak langsung tersebut, usulan *Quick Wins* BPIW adalah tersusunnya masterplan keterpaduan infrastruktur di 35 wilayah pengembangan strategis (WPS), perencanaan, dan pemrograman yang lebih terpadu dan tersinkronisasi.

"BPIW sudah melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur yg terpadu

Road Map BPIW mengambil base line dari hasil assesmen kesiapan organisasi, kerangka program dan kegiatan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

yang evidence-nya adalah development plan di beberapa WPS. Dari 35 WPS tidak perlu semuanya dijadikan *Quick Wins*, dapat diambil 5 atau 4 WPS saja yang menjadi sampel untuk *Quick Wins*," ungkap Dadang.

WPS yang dijadikan sampel diharapkan dapat mencakup semua tugas dan fungsi dari BPIW. Salah satu WPS yang dapat dijadikan

acuan adalah WPS Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT). Pasalnya di WPS ini terdapat pusat pertumbuhan, daerah berkembang, daerah tertinggal kawasan metro kota besar juga kawasan perdesaan dan lainnya.

Masing-masing anggota kelompok kerja yang terbagi dalam delapan kelompok kerja reformasi birokrasi hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, FGD ini juga dihadiri beberapa pimpinan BPIW seperti Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Haris Batubara dan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Hadi Suahyono.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Mirna Amin, yang menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion itu mengatakan Kementerian PUPR telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dengan demikian menurut Mirna, BPIW sebagai salah satu unit organisasi dari kementerian PUPR, tidak terlepas peranannya dalam menerapkan reformasi birokrasi tersebut. (Bri/InfoBPIW)

BPIW Kementerian PUPR Usulkan Penyesuaian Anggaran Rp 89,8 Miliar ke DPR RI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penyesuaian belanja sebesar Rp 89,8 miliar dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (15/6).

Dardak menuturkan penyesuaian anggaran belanja dilaksanakan dengan melakukan self blocking yang terdiri atas Rp 81,2 miliar dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ditunda/disesuaikan dan kegiatan sisa lelang sebesar Rp 8,6 miliar.

Lebih lanjut Dardak mengatakan anggaran BPIW mengalami penyesuaian anggaran



Hermanto Dardak saat memberikan paparan

sebesar 18%, sehingga target penyiapan piranti dimaksud sebagian ditunda dan untuk beberapa kegiatan akan dilakukan rasionalisasi.

Dikatakannya juga bahwa salah satu kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan BPIW, adalah penyusunan program infrastruktur PUPR yang

berbasis pengembangan wilayah melalui Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). "Pra Konreg telah berperan sebagai wahana komunikasi antar satminkal pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara Pusat dan daerah," jelas Dardak.

Pada pelaksanaan kegiatan tahun

anggaran 2016 menurut Dardak telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program. "Melalui pendekatan wilayah sehingga setiap kegiatan diorientasikan, tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau kawasan tersebut," tutur Dardak.

Melalui basis pengembangan wilayah, program Kementerian PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan

alokasi pagu indikatif sebesar Rp 104 triliun, maka dilakukan penyesuaian terhadap

Penyesuaian anggaran belanja dilaksanakan dengan melakukan *self blocking* yang terdiri atas Rp 81,2 miliar dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ditunda/disesuaikan dan kegiatan sisa lelang sebesar Rp 8,6 miliar.

hasil Pra Konreg baseline Rp 166 triliun dengan prinsip-prinsip pemotongan vertikal,

yang tidak mengganggu outcome prioritas, lalu sisa lelang atau kontrak, pemotongan paket-paket yang belum lelang, dan pemotongan paket yang diprediksi tidak selesai hingga akhir 2016.

Taufik menjelaskan penghematan senilai Rp 8,495 triliun tersebut terdiri dari pengurangan kegiatan dari Program Pengelolaan Sumber Daya air sebesar Rp 1,942 triliun dan Program Penyelenggaraan Jalan senilai Rp 4,975 triliun. Kemudian dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Rp 1,083 triliun, Program Pengembangan Perumahan Rp 355,4 miliar, Rp 48,4 miliar dari Program Pembinaan Konstruksi, dan Rp 89,8 miliar dari program BPIW. **(INI/InfoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

konektivitas dengan presentase 23,3% (Rp 38,6 miliar), keseimbangan antar wilayah, ketahanan air dengan presentase 22,3% (Rp 37 miliar), kedaulatan pangan dan energi sebesar 36,7% (Rp 61 miliar) serta peningkatan kualitas hidup sebesar 17,7% (Rp 29,4 miliar).

Dengan mempertimbangkan bahwa

namun untuk beberapa kegiatan tertentu independen dapat dengan pemotongan horizontal (ditunda).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjono mengatakan bahwa kriteria penghematan yaitu belanja operasional dan belanja modal

Dukungan Kementerian PUPR Terkait Pembentukan KEK Sorong dan KEK Merauke



Sumber: Dok BPIW

Hermanto Dardak memaparkan dukungan Kementerian PUPR terkait pembentukan KEK Sorong dan KEK Merauke

Dalam Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 terdapat salah satu pembangunan wilayah, yakni Sorong – Manokwari, yang di dalamnya telah dibangun jalan nasional sebagai tulang punggungnya. Kemudian, dalam mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, pada tahun ini, Kementerian PUPR sudah memprogramkan peningkatan konektivitas berupa peningkatan struktur jalan Sorong – Makbon sepanjang 3 km.

“Selain itu Kementerian PUPR sudah

memprogramkan pelebaran Batas Kota Sorong – Klamono sepanjang 5 km dan peningkatan struktur jalan Lingkar Sorong menuju Pelabuhan Arar sepanjang 3,5 km,” tutur Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat mewakili Menteri PUPR pada rapat koordinasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke di Jakarta, Rabu (29/6).

Terkait dengan pengusulan KEK Merauke, Kementerian PUPR melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Jayapura – Merauke yang di dalamnya terdapat program utama mendukung kawasan industri pangan di Merauke, yaitu Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE) baik dari pembangunan Jalan Nakias – Kaliki, preservasi rehabilitasi mayor Jalan Bupul – Muting dan Merauke – Bupul, serta beberapa pembangunan daerah irigasi di sekitar kawasan MIFEE.

Saat memimpin rapat tersebut, Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam rangka mendukung KEK Sorong, telah ada rencana dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT PLN, dan dukungan kementerian terkait lainnya. Dikatakannya juga, dari segi infrastruktur PUPR, telah dibangun akses jalan nasional dari dan ke Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar. Namun diakuinya masih perlu adanya peningkatan jalan nasional ke Pelabuhan Arar dan sudah terdapat suplai air bersih dari sumur dalam. Darmin juga menyatakan saat ini sudah diprogramkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kabupaten Sorong, masih diperlukan dukungan pembangunan jaringan distribusi dari SPAM Regional ke lokasi KEK. Ia juga menjelaskan bahwa dalam rencana

pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur kawasan pada tahun 2017 – 2018, Pemkab Sorong akan fokus pada

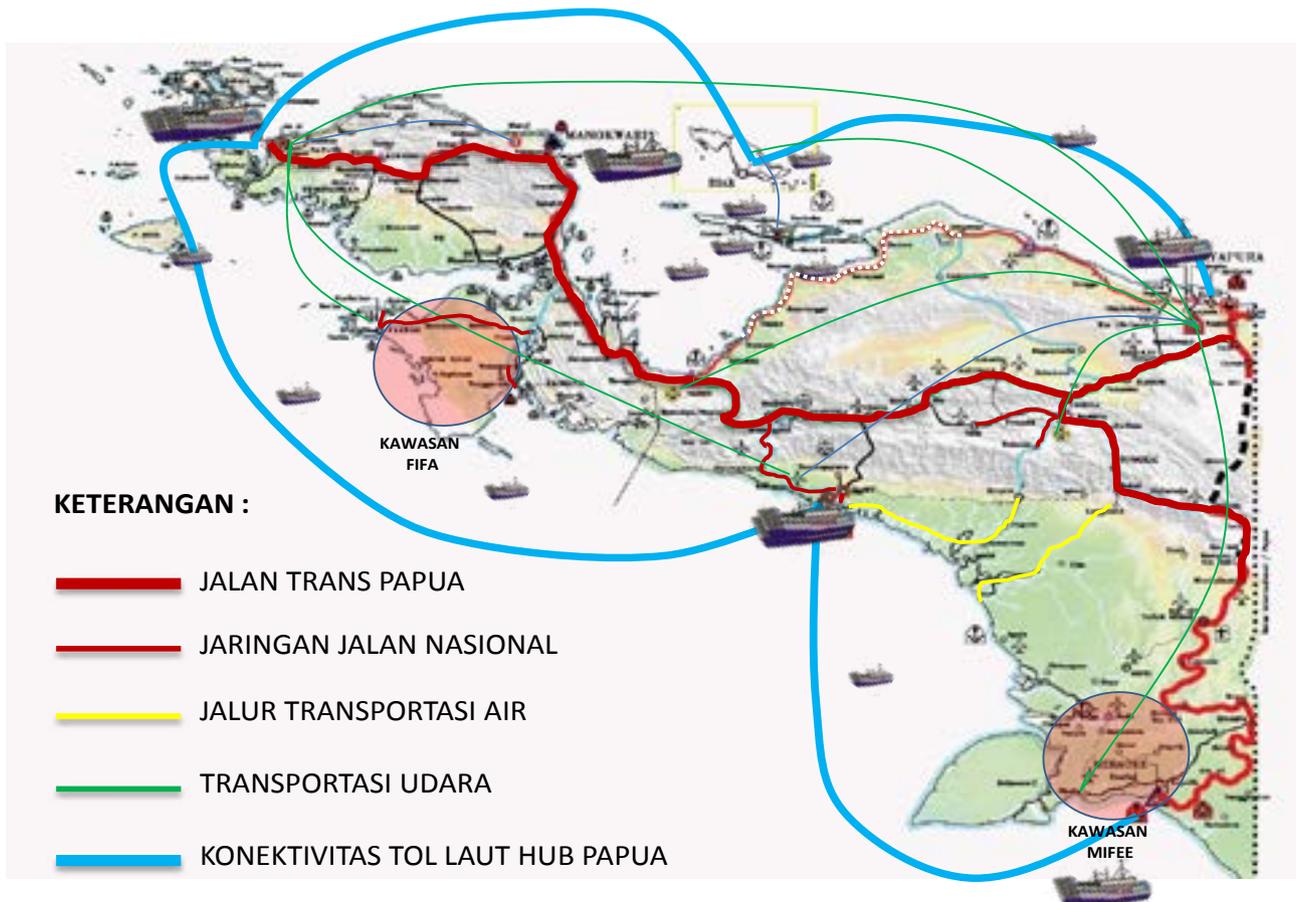
Dalam rencana pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur kawasan pada tahun 2017–2018, Pemkab Sorong akan fokus pada pembangunan infrastruktur di lahan seluas 198,5 ha yang telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

pembangunan infrastruktur di lahan seluas 198,5 ha yang telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 Pemkab Sorong akan melakukan pembebasan lahan seluas 310,2

ha secara bertahap pada TA 2019 - 2020 melalui APBD Kab. Sorong.

Selain KEK Sorong, perlu dukungan dari Pemerintah dalam pengusulan KEK Merauke. Darmin mengatakan saat ini dari segi infrastruktur sudah terdapat jalan nasional yang menghubungkan Kab. Merauke dengan Kab. Boven Digul, jalan provinsi yang menghubungkan Distrik Merauke ke Distrik Kurik dan jalan kabupaten yang menghubungkan ke lokasi KEK. "Dukungan Kementerian PUPR memang diperlukan dalam pengusulan KEK Merauke terkait beberapa hal seperti peningkatan jalan nasional, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional dan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional," tutur Darmin. **INI/InfoBPIW**

KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TERPADU PULAU PAPUA



BPIW Gelar *Wrap Up Meeting* Terkait Dukungan Infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata

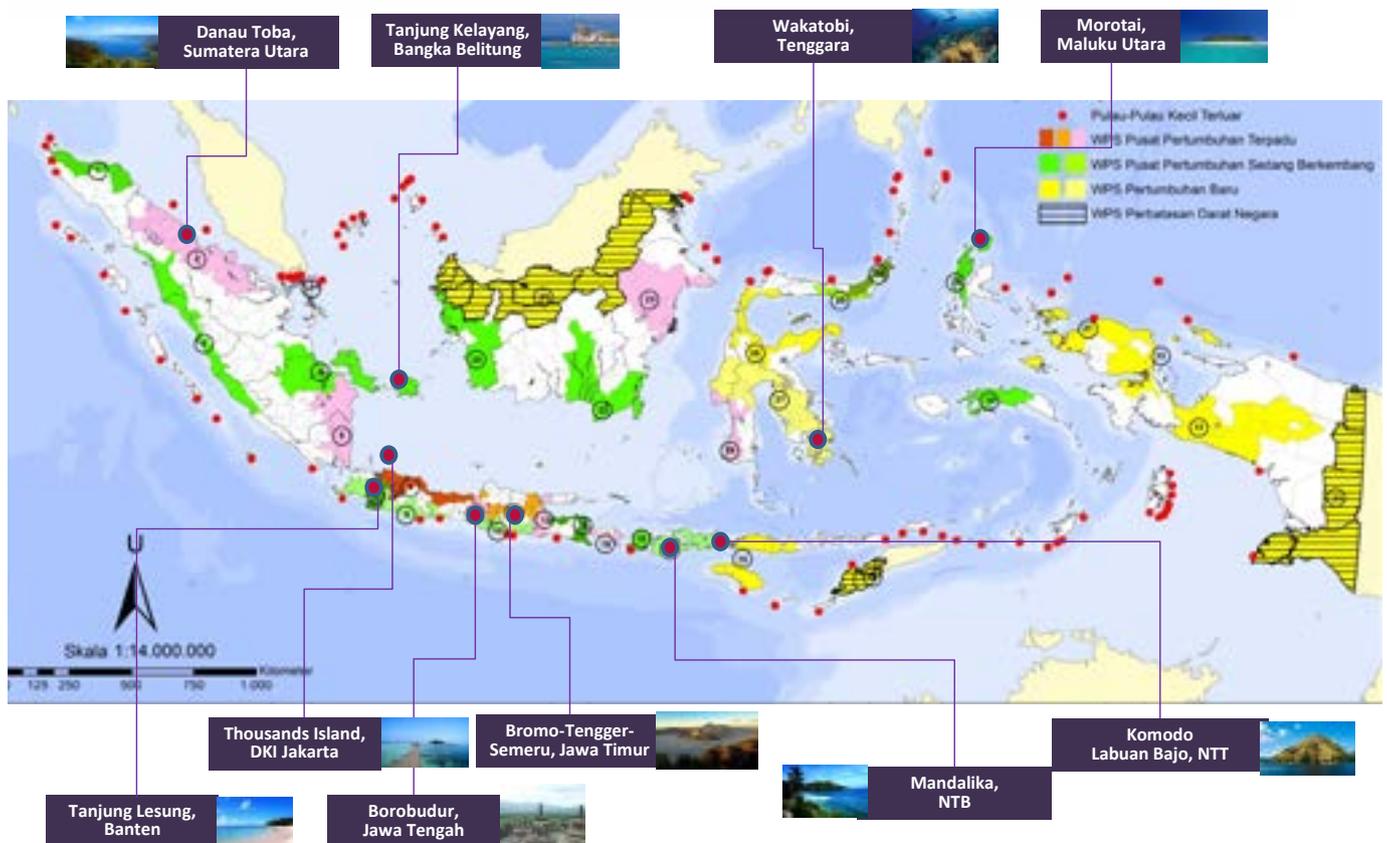
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan *Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission* terkait dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata, di Ruang Rapat BPIW, Selasa (21/06).

Saat membuka acara tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Ridwan Djamiluddin, menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan *wrap up meeting* ini adalah Tim World Bank menyampaikan hasil identifikasi selama *Pre-Appraisal Mission* yang berlangsung pada tanggal 9 -21 Juni 2016.

Selain itu ia berharap ada kesepakatan time frame terkait rencana tindak lanjut penyiapan program *Infrastructure for Tourism*.

Sementara tujuan dari *Pre-Appraisal Mission* adalah melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program - program, termasuk kerangka pembiayaan, hasil, dan evaluasi ekonominya. Kemudian juga

10 Priority of National Tourism Strategic Areas (KSPN) in SDR





Rezeki Peranginangin memimpin Wrap Up Meeting Terkait Dukungan Infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata

Sumber: Dok BPIW

mendiskusikan langkah-langkah untuk menangani isu-isu utama, mengajukan penilaian sistem fidusia dan penelaahan lingkungan serta sosial. Selanjutnya juga menyepakati jadwal untuk langkah-langkah selanjutnya termasuk identifikasi sumber daya yang dibutuhkan.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, saat memimpin rapat tersebut mengungkapkan tindak lanjut dari hasil rapat dengan wakil presiden akan segera dilakukan penentuan tiga atau empat destinasi yang menjadi prioritas, dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Selain itu penentuan investasi infrastruktur yang dilakukan pada tahun pertama yang selesai dilakukan pada Agustus 2016. "Selanjutnya juga akan dilakukan penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan masterplan terpadu dan menunggu kepastian dari Kementerian Pariwisata," tutur Rezeki.

Sementara itu, Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, Mesdin Simarmata mengatakan perlu

kepastian kesediaan Kementerian Pariwisata terkait skema loan dalam penyusunan masterplan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas "Diperlukan konfirmasi dari pihak World Bank mengenai standar

Tujuan dari *Pre-Appraisal Mission* adalah melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program - program, termasuk kerangka pembiayaan, hasil, dan evaluasi ekonominya

masterplan dan dukungan pihak World Bank lainnya, jika penyusunan masterplan didanai APBN."

Terkait pengembangan kawasan pariwisata 10 destinasi prioritas, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Endra S. Atmawidjaja juga menyatakan diperlukan platform kelembagaan, strategi percepatan, serta

masterplan sebagai acuan bagi semua pihak dalam pengembangan destinasi pariwisata.

Dalam rapat tersebut, Tim World Bank mengutarakan bahwa untuk progres penilaian teknis masih dalam proses pengerjaan, disebabkan masih dibutuhkan kelengkapan data. Hasil tersebut nantinya akan diserahkan kepada Wakil Presiden dan pihak terkait. Salah satu hasil identifikasi seperti diperlukannya masterplan terpadu dan detailed site plan untuk pengembangan infrastruktur lebih lanjut, termasuk mekanisme untuk memastikan kualitas dan perawatan infrastruktur agar tetap terjaga dengan baik.

Disamping itu, Tim World Bank juga menyampaikan hasil identifikasi terhadap peningkatan lingkungan yang kondusif untuk investasi pariwisata, seperti diperlukannya kemudahan untuk tiga hal yaitu, izin lokasi, lingkungan, dan pembangunan. **Pongki/Info BPIW**

Konsinyasi Penyusunan *Masterplan* Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Guna menyamakan persepsi terkait output Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, mengadakan konsinyasi penyusunan masterplan tersebut, di Jakarta, (21/6).

Masterplan KPPN ini sebagai bentuk implementasi amanat RPJMN 2015-2019, dan akan menjadi acuan beberapa kementerian terkait pengembangan kawasan perdesaan, dalam memfokuskan program dan anggarannya hingga tahun 2019 mendatang. Untuk itu perlu disepakati materi yang akan dimuat dalam masterplan termasuk didalamnya metode, analisis, dan tingkat kedetailan. Penyusunan masterplan dilakukan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementerian Desa PDTT.

Saat membuka konsinyasi, Asdep. Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Awal Subandar mengatakan KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Program-program lintas kementerian atau lembaga terkait pengembangan kawasan perdesaan, dapat difokuskan



Pembukaan Konsinyasi Penyusunan Masterplan KPPN

Sumber: Dok BPIW

pada beberapa lokasi KPPN, sehingga akan didapatkan kawasan perdesaan yang komprehensif dan mampu menjadi pilar pengembangan ekonomi wilayah serta dapat mensejahterakan masyarakat," ujar Subandar. Pengembangan KPPN dilakukan secara bertahap, dimana tahun 2016 ditargetkan dikembangkan 14 KPPN, tahun 2017 sebanyak 14 KPPN, dan tahun 2018 sebanyak 12 KPPN.

Beberapa sasaran ditetapkan, seperti penurunan desa tertinggal hingga lima ribu desa dan peningkatan desa mandiri

sampai dua ribu desa. Selain itu dilakukan peningkatan keterkaitan pembangunan kota desa, dengan memperkuat 40 pusat pertumbuhan baru. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Nawacita poin ketiga, yakni membangun dari pinggiran dengan memperkuat kawasan perdesaan di seluruh Indonesia.

Subandar mengatakan pusat pertumbuhan tersebut akan didorong untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan mengangkat ekonomi di desa-desa tertinggal dan

berkembang.

Saat memimpin jalannya konsinyasi, Kabid Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus, MT mengatakan kedudukan masterplan dalam siklus pembangunan berada pada tahap perencanaan, yang berpayung pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJM baik nasional, daerah maupun renstra dari kementerian atau lembaga.

Ia juga menyampaikan bahwa prinsip-prinsip penyusunan masterplan KPPN yang perlu dicermati antara lain, fungsi masterplan sebagai pemberi arah pembangunan secara menyeluruh atau lintas sektor. "Masterplan merupakan dokumen kesepakatan, siapapun yang terkait didalam dokumen tersebut, ikut berpartisipasi di dalam pembangunan," tutur Sanusi. Penentuan kawasan perdesaan menurut Sanusi dilihat dari Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW terutama mengenai aksesibilitas dan alur produksinya. Jika ada keterkaitan antar desa hinterland dan pusat pertumbuhan serta PKW, maka itu dianggap suatu kawasan.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat ini diantaranya, terkait proses penyusunan masterplan disarankan

untuk dilakukan pembagian tugas, dimana Kementerian DPDTT mendampingi pemerintah daerah. Sedangkan Kementerian ATR dan PUPR melakukan mengawasi. Menyangkut pengembangan kawasan perdesaan Kementerian PUPR memosisikan diri sebagai instansi penunjang. BPIW selaku unit perencana bertugas menyusun masterplan pengembangan kawasan

yang jelas sebagai prioritas nasional. Selain itu akan dilakukan ekspos draft masterplan yang telah disusun oleh Kementerian PUPR. Hal ini untuk mendapatkan masukan dari kementerian atau lembaga sebelum dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini diikuti beberapa instansi seperti Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas, Direktorat Sarana dan Prasarana, Kemendes PDTT, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Selain itu juga diikuti Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata, Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen Energi Baru dan Konservasi Energi

Kementerian ESDM, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Industri Kecil Menengah dan Pangan Kementerian Perindustrian, serta Deputi Permodalan, Kementerian Koperasi dan UKM. **Shahnaz/Hendra/infobpiw**

Sanusi Sitorus, MT mengatakan kedudukan masterplan dalam siklus pembangunan berada pada tahap perencanaan, yang berpayung pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJM baik nasional, daerah maupun renstra dari kementerian atau lembaga.

dan mengarahkan sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya untuk mengimplementasikan masterplan yang telah disusun tersebut.

Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan beberapa hal seperti Kemenko PMK yang akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi KPPN, agar pengembangannya memiliki dasar hukum

Sumber: Dok BPIW



Pengembangan Kota Baru

Mewujudkan Pemerataan Hunian Untuk Semua Kalangan Masyarakat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tahun 2010, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 49,8 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3 persen. Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan akan meningkat menjadi 56,7 persen pada tahun 2020. Untuk mengatasi meningkatnya angka tersebut, Kementerian PUPR merencanakan pengembangan kota baru publik.



Tampak atas desain kawasan Kota Baru Maja

Sumber: Dok. PUPR



Konsep Smart City

Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, pengembangan kota baru publik merupakan upaya untuk mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali atau urban sprawl akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. Kota baru publik ini juga untuk memberikan pemerataan hunian pada semua kalangan masyarakat.

Pengembangan kota baru publik merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pada lampiran Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali diperuntukkan bagi masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah, serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

Pengembangan kota baru publik merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pada lampiran Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.

“Disamping memberikan hunian bagi semua kalangan masyarakat. Pengembangan kota baru publik juga memerlukan investasi pihak swasta dan masyarakat, sehingga pengembangan kota tersebut tidak

hanya menggunakan APBN saja,” ujar Dardak beberapa waktu lalu.

Terminologi kota baru publik yang digunakan dalam Buku III RPJMN itu merupakan kota baru yang direncanakan, disepakati, dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan oleh sektor publik. Dengan berpijak pada Nawacita, Presiden juga mengamanatkan agar negara harus hadir dalam penyediaan perumahan untuk berbagai kalangan pada pembangunan kota baru publik tersebut. Konsep negara hadir, berarti menuntut keterlibatan publik seperti pemerintah pusat (termasuk juga kementerian dan lembaga), pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, BUMN, dan BUMD.

Meskipun dalam pelaksanaannya sektor publik memiliki peran yang lebih dominan, namun unsur swasta tetap dibutuhkan, dik-

KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA BARU 2015-2019 (PERUMAHAN-PEMUKIMAN)



Terdapat **10** Lokasi Pengembangan Kota Baru Alternatif dalam RPJMN 2015-2019

arenakan perwujudan pembangunan suatu kota merupakan sinergi pembangunan antara sektor publik maupun stakeholder lainnya.

BPIW Kementerian PUPR diamanatkan pemerintah untuk merencanakan dan menyusun development plan 10 kota baru publik. Hingga saat ini, yang sudah ditangani BPIW sebanyak enam kota baru publik, yakni Sei Mangke di Sumatera Utara, Maja di Banten dan Jawa Barat, Bandar Kayangan di Nusa Tenggara Barat, Pontianak di Kalimantan Barat, Sofifi di Maluku Utara, dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara.

Pada tahun 2016, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW fokus pada penyediaan development plan dan master plan di tiga kota baru yaitu Maja, Sofifi-Ternate, dan Bandar Kayangan. Development plan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam program pembangunan infrastruktur PUPR bagi kota-kota yang diprioritaskan dalam RPJMN, dan kota-kota yang berada di wilayah pengembangan strategis (WPS). Disiap-

kan juga kerangka kebijakan teknis, seperti mempersiapkan kesepakatan bersama atau MoU untuk mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR di tiga kawasan, yakni Kota Baru Publik Maja, Tanjung Selor, dan Sei Mangke – Kuala Tanjung.

Untuk kota yang belum mendapatkan penanganan spesifik pada tahun 2016, akan tetap dilakukan penyusunan program pengembangannya melalui metode quick assessment atau penilaian secara cepat atas kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan yang terpadu. Penilaian ini didasarkan pada RPJMN dan RTRW masing-masing wilayah. Dalam penilaian tersebut, dilakukan pembahasan, termasuk juga mengenai konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang melibatkan expert judgment atau penilaian dari para ahli.

Pada tahun 2017 mendatang, BPIW akan tetap fokus pada masterplan dan development plan untuk kota-kota yang belum ditangani pada 2016, yang didasari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2016. Dalam Renstra PUPR tersebut terdapat 97 kawasan strategis didalam WPS yang harus ditangani.

Kota Baru Publik Maja, Solusi Mengurangi Beban Jabodetabek

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memadukan pengembangan infrastruktur dengan pembangunan kawasan. Salah satu kawasan yang potensial yang dikembangkan dan telah diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 1994 adalah kawasan Maja yang berada di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Walaupun sebelumnya Maja telah direncanakan sebagai kota baru oleh Pemerintah namun perkembangan pembangunan di Maja tidak sesuai yang rencana hingga beberapa tahun setelahnya.

Pada tahun 2015, penduduk di wilayah Maja mencapai 494.197 jiwa. Potensi geografis yang dimiliki oleh Maja yaitu berupa dataran relatif datar dengan potensi lahan yang cukup luas tersedia untuk dikembang-

kan. Untuk mencapai wilayah Maja dapat dijangkau melalui Jalan Tol Jakarta-Merak, exit Cikupa atau menggunakan sarana transportasi kereta api (commuter line) rel ganda (double track) yang berjarak kurang lebih 70 km dari provinsi DKI Jakarta.

Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja tertuang dalam sasaran pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, dimana Maja merupakan satu dari 10 lokasi yang akan dikembangkan menjadi Kota Baru Publik. Program ini sejalan dengan program percepatan program satu juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Langkah nyata inisiasi kembali pengembangan Kota Baru Publik Maja ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2016 lalu bertempat di Kementerian PUPR. Selain Kementerian PUPR sebagai inisiator, MoU tersebut juga melibatkan Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pengembang.

Dari pemerintah daerah, penandatanganan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten

Meskipun dalam pelaksanaannya sektor publik memiliki peran yang lebih dominan, namun unsur swasta tetap dibutuhkan, dikarenakan perwujudan pembangunan suatu kota merupakan sinergi pembangunan antara sektor publik maupun stakeholder lainnya.

Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian dari pihak swasta juga turut melakukan penandatanganan yaitu pimpinan Perum Perumnas, PT. Nusa Graha Perkasa, PT. Agung Podomoro Land, PT. Hanson International, Tbk.

“Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam percepatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek,” tutur Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Penandatanganan tersebut menurut Basuki, merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat akan dikembangkan pada tahun 1994 lalu. Saat itu ada pemikiran mengembangkan kota kekerabatan Maja, namun pada tahun 1998 terjadi krisis moneter sehingga pengembangan Maja tersendat.

Dardak menambahkan Maja merupakan satu dari enam lokasi kota baru publik yang sudah ditangani Kementerian PUPR. Keenam kota baru publik tersebut adalah Sei Mang-



Tampak atas Kota Maja saat ini

Sumber: Dok. PUPR

kei, Pontianak, Tanjung Selor, Sofifi, Bandar Kayangan, dan Maja. Luas pengembangan Kota Baru Publik Maja lebih kurang 10 ribu hektar (belum termasuk Kawasan Parung Panjang seluas lebih kurang 8.276 hektar). Wilayah Maja nantinya tersebar di tujuh kecamatan dalam Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Konsep pengembangan Maja dengan prinsip smart - green and inclusive city, yakni kota yang ramah lingkungan, kota cerdas, produktif, dan mensejahterakan warganya. Konsep tersebut untuk menunjang Maja yang diperkirakan akan dihuni 1,5 juta penduduk pada 2035 mendatang. "Maja akan menjadi Kota Satelit Mandiri yang mana diupayakan tersedianya sistem permukiman perkotaan berimbang dengan komposisi 1:2:3, dimana 3 untuk MBR, 2 untuk masyarakat berpendapatan sedang, dan 1 untuk masyarakat atas. Artinya 60% kawasan tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dardak.

Sementara konsep konektivitas yang dilakukan adalah commuter line Jakarta - Parung Panjang bagian dari Jabodetabek, commuter line Parung Panjang - Maja bagian dari Kota Baru Publik Maja, dan sistem jaringan transportasi wilayah dan perkotaan khusus Kota Baru Publik Maja. Terkait konektivitas, juga dilakukan pembangunan akses regional ke pelabuhan dan bandara, serta pembangunan dan inovasi pengembangan sumber daya air.

Agar pembangunan infrastruktur berjalan harmoni dengan pengembangan kawasan, menurut Dardak, saat ini sedang disusun master plan dan development plan pengembangan Maja. Dalam master plan dan development plan tersebut memuat beberapa hal, diantaranya jalan akses menuju Maja dari Pamulang ke Rangkasbitung sepanjang 58,35 km sebagai akses utama yang linier

dengan rencana Jalan Tol Serpong-Balaraja, serta Rel Ganda Kereta Api Jakarta - Maja.

"Pengembangan Maja juga akan menerapkan Transit Orientation Development atau TOD dengan basis ekonomi yang mampu mendukung kawasan industri di Balaraja, Cikupa, Jayanti, dan Cikande serta Kawasan Agro Industri." ungkap Dardak.

Selain menyiapkan master plan dan development plan, juga akan dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Akses ke Maja dengan ROW atau Ruang Milik Jalan sebesar 40 meter, penetapan lokasi untuk pembebasan tanah - pengadaan tanah untuk pelebaran jalan eksisting, dan jalan baru (termasuk lahan milik pengembang).

Pada tahun ini, program utama Infrastruktur PUPR Kota Baru Publik Maja yang sedang dilakukan diantaranya pembangunan Waduk Sindangheul, pembangunan Waduk Karian, dan Pra Feasibility Study atau FS Jalan Strategis Pamulang - Serpong - Setu - Parung



Peta pembangunan infrastruktur Kota Baru Publik Maja dan Sekitarnya Tahun 2017

Sumber: Kementerian PUPR

Panjang – Maja sepanjang 58,35 km. Sementara itu, Jalan Tol Serang – Panimbang akan dilakukan pelelangan dan Jalan Tol Serpong – Balaraja sudah memasuki tahap tanda tangan kontrak.

Tahun 2017 mendatang, pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian dalam proses pengerjaan. Untuk pembangunan Jalan Tol Kunciran – Serpong dan Jalan Tol Serpong – Balaraja Seksi 1, serta seksi 2 Serpong – Legok, tahun depan akan memasuki proses penyediaan lahan.

Kemudian juga akan dilakukan peningkatan dan pembangunan jalan Pamulang – Kota Baru Maja sepanjang lebih kurang 58,35 km. Untuk perumahan, akan dibangun rumah untuk MBR bersubsidi dan infrastruktur permukiman, serta pembangunan rumah swadaya Provinsi Banten sebanyak 1.500 unit. Selain itu, juga direncanakan Rehabilitasi Mayor Cikande – Rangkasbitung Kabupaten Lebak sepanjang 2,2 km dan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Rangkasbitung – Maja.

Untuk Ultimate Program 2025, di Kota Baru Publik Maja ini akan terdapat Bendungan Sindang Heula, Bendungan Karian, Double Track Kereta Api Jakarta – Maja – Merak, Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Serpong Balaraja, Jalan Akses Pamulang – Maja, dan Rumah MBR Bersubsidi dan Infrastruktur Permukiman. Pengembangan kawasan Maja ini terkait WPS 7 Jakarta – Bogor – Ciawi – Sukabumi dan WPS 9 Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap.

Untuk kawasan Timur Jabodetabek, telah dilakukan sinkronisasi dan implementasi program pembangunan melalui MoU, dan telah pula dilakukan untuk Kawasan Industri Cikarang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, PT Jasa Marga dan tujuh Pengembang Kawasan Industri.

Bagi Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta, pengembangan Maja akan menjadi salah



Basuki Hadimuljono memberikan arahan pada saat Penandatanganan Kesepakatan

Sumber: Kementerian PUPR

satu pemecahan permasalahan ketersediaan perumahan di Provinsi Banten. Disebutkannya kekurangan ketersediaan rumah di daerah ini mencapai sekitar 632.502 unit. Kekurangan perumahan terbesar berada di Kabupaten Tangerang. Permasalahan tersebut menurutnya tidak dapat diselesaikan se-

dan prasarana lintas provinsi. Provinsi Jawa Barat juga mendukung penyediaan perumahan bagi MBR. "Kami juga mendukung Kabupaten Bogor untuk mengembangkan permukiman lebih teratur dengan menyediakan kawasan siap bangun, bekerjasama dengan pihak swasta," tegasnya. Melalui kerjasama

ini, selain dapat mengefektifkan anggaran negara, juga menggerakkan anggaran investasi swasta dan masyarakat. Disamping itu, proses perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah daerah setempat, serta mempercepat perwujudan kota baru publik tersebut. **Tim Redaksi**

"Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam percepatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek." tutur Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

pihak saja, tapi perlu didukung seluruh stakeholder terkait perumahan dan permukiman.

Sementara itu Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa menegaskan instansinya mendukung sepenuhnya, terutama terkait penanganan penyediaan sarana

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan



Dr. Ir. Sanusi Sitorus, MT

*Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan*

Desa merupakan tempat produk pertanian dan perkebunan dihasilkan. Keberadaan desa menjadi sangat penting, karena bila tidak ada produk yang dihasilkan di desa, maka tidak ada bahan-bahan pokok makanan yang bisa dinikmati masyarakat, terutama bagi masyarakat di perkotaan. Dengan kondisi tersebut, maka sudah sepatutnya dilakukan pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan.



Jalan usaha tani ke perkebunan kelapa di Desa Daruba di kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara

Sumber: Dok. PUPR

Salah satu yang tertuang dalam Nawacita pemerintahan saat ini adalah, membangun dari pinggiran. Daerah pinggiran ini bisa diartikan sebagai kawasan perbatasan, pulau terluar, dan perdesaan. Jadi pada prinsipnya pemerintah sudah hadir di pinggiran. Bila pemerintah sudah hadir di pinggiran, ini berarti banyak program yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan hingga 2019 mendatang. Bila Nawacita dilaksanakan, maka sudah semestinya dana untuk kawasan perdesaan lebih besar. Apalagi jumlah desa yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 74 ribu desa.

Saat ini melalui program desa membangun, sudah ada Rp 700 juta yang diberikan per desa. Bila anggaran tersebut diberikan terus dalam beberapa tahun, mudah-mudahan pembangunan di perdesaan mulai menggeliat. Sebelumnya, pembangunan di perdesaan, terutama pembangunan infrastruktur, belum dapat membuka aksesibilitas yang membawa

hasil bumi dari pusat produksi di perdesaan ke kota kecil, karena saat itu kondisi jalan belum memadai. Namun kini sudah mulai banyak jalan kondisinya sudah diaspal, meski perlu ditingkatkan.

Selama ini hasil bumi dari desa, itu sifatnya dipetik dan langsung dijual. Terkadang yang memetik malah tengkulak. Saat ini Kementerian PUPR mendorong pola tersebut menjadi petik, olah, dan jual atau POJ.

Jadi bila tidak diperhatikan dengan baik, perkembangan kawasan perdesaan semakin tertinggal dengan perkotaan. Padahal bila akses ke desa putus, maka kota tidak dapat memenuhi kebutuhan akan makanan maupun

sayuran yang dihasilkan desa. Selama ini hasil bumi dari desa, itu sifatnya dipetik dan langsung dijual. Terkadang yang memetik malah tengkulak. Saat ini Kementerian PUPR mendorong pola tersebut menjadi petik, olah, dan jual atau POJ. Dengan pola ini, petani bukan hanya dapat memanen hasil pertaniannya, tapi juga dapat mengolah hasil pertaniannya. Selain memetik dan mengolah, petani juga dapat langsung menjualnya. Dengan cara ini pendapatan para petani lebih maksimal ketimbang ketika saat panen, diborong oleh tengkulak.

Dengan pola tersebut, maka kegiatan utama agro bisnis pertanian ada tiga yakni on farm production, agro processing, dan agro marketing. Jadi bila petani memerlukan air baku untuk peningkatan produksi sayuran, misalnya, maka kita dapat membantunya. Bukan hanya

itu, kita juga mendorong adanya pengolahan hasil pertanian hingga final product sehingga petani mendapatkan nilai tambah. Dengan membangun konektivitas atau membuat akses jalan, petani dapat membawa hasil produksi ke kota terdekat.

Sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, kita terlebih dahulu harus mengetahui secara jelas, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian kita melakukan survei terkait aspirasi masyarakat tersebut. Setelah melakukan survei, disusun masterplan. Kemudian kebutuhan mereka tersebut direalisasikan. Dalam penanganan kawasan perdesaan, bukan hanya dilakukan satminkal yang ada di Kementerian PUPR semata, tapi juga ditangani kementerian lain, karena perdesaan merupakan lintas sektor.

Dalam pengembangan kawasan perdesaan tersebut, ada sembilan program prioritas pemerintah, yakni membangun

infrastruktur, membangun permodalan, membangun teknologi, membangun usaha tani, membangun kelembagaan, membangun pendidikan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), masyarakat,

Sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, kita terlebih dahulu harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian kita melakukan survei terkait aspirasi masyarakat tersebut. Setelah melakukan survei, disusun masterplan.

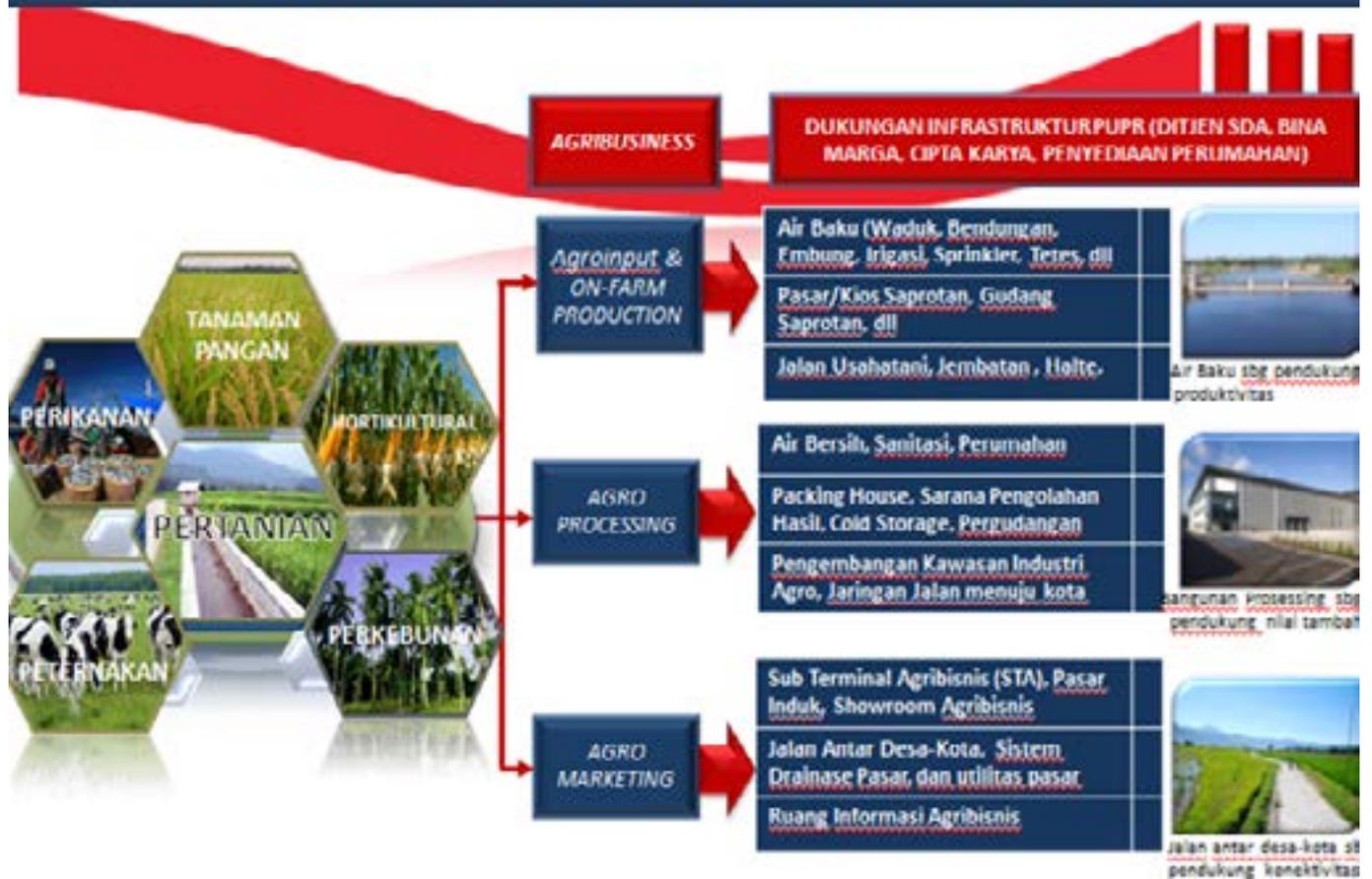
membangun sumber daya dengan mikrohidro, dan komunikasi.

Kementerian dan lembaga atau K/L, tidak lagi membantu desa per desa, karena sudah

ada bantuan dari pemerintah sebesar Rp 700 juta hingga Rp 1 milyar per desa. Sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang mengatur tata cara penggunaan dana desa. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur. Sedangkan Kementerian PUPR hanya memberikan bantuan teknis terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan kawasan perdesaan dibagi dalam dua kategori yakni desa membangun dan membangun desa. Istilah membangun desa, juga termasuk kawasan pedesaan. Kementerian PUPR bersama K/L yang lain, membantu pengembangan desa. Pengembangannya dimulai dari pusat pertumbuhan, dimana skalanya adalah Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW. Contohnya Kabupaten Banyuwangi, dimana yang kita tangani bukan ibukota kabupaten Banyuwanginya, tapi yang kita lihat hinterland

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN



mana yang menjadi kawasan perdesaan dan yang menjadi pemasok industri pertanian.

Dalam melaksanakan program terkait kawasan perdesaan, kita juga memenuhi amanat RPJMN 2015-2019, yakni melakukan keterpaduan dengan 40 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) meliputi Agropolitan, Minapolitan, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Pada tahun 2017 yang menjadi prioritas pengembangan yaitu 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), meliputi: Banyuwangi (Jawa Timur), Praya (NTB), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), Labuan Bajo (NTT), Sidikalang (Sumatera Utara), Daruba (Maluku Utara), Merauke (Papua), Rasau Jaya (Kalimantan Barat), Misool ((Papua Barat), Bula (Maluku), Maba (Mauluku Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Tabanan (Bali), dan Pinrang (Sulawesi Selatan).

Jadi yang kita dukung mulai dari Kota Metro hingga Desa Mandiri. Dalam Desa Mandiri sudah ada desa-desa berkembang yang hinterland pada desa-desa yang berkembang tersebut.

Dari perencanaan yang kita lakukan, titik pentingnya adalah bagaimana hasil produksi desa tersebut bisa dibawa keluar dari desa dengan lancar. Jadi misalnya suatu desa hanya membutuhkan 10 ton padi, namun produksi padinya mencapai 70 ton, maka berarti 60 ton dibawa keluar desa itu menuju kota kecil sekitarnya.

Untuk membawa keluar desa yang bersangkutan, maka infrastruktur jalan mempunyai peran yang sangat penting, sehingga bila infrastruktur jalan sudah lancar, maka konektivitas antara desa dan kota kecil terhubung dengan baik. Infrastruktur jalan penting, karena kalau jalannya rusak, maka akan membutuhkan waktu perjalanan yang lama, sehingga akan membuat hasil produksi desa, seperti sayur mayur akan menjadi busuk, dan tidak dapat dijual ke kota.

Konektivitas juga dibangun untuk memperlancar produksi untuk diekspor. Misalnya, hasil produksi dari Praya di Lombok berupa lobster yang akan di ekspor ke luar negeri. Untuk itu kita dukung dengan membuat akses menuju bandara terdekat maupun pelabuhan menuju Surabaya maupun Jakarta. Dalam membuat konektivitas, kita melihat komoditinya. Bila komoditi ekspor, kita melihat kelancaran itu pada kota outlet

sebelum diterbangkan.

Tapi kalau komoditinya dikonsumsi masyarakat secara umum seperti sayur, pembangunan infrastruktur jalannya dilakukan berjenjang, mulai dari desa yang memproduksi sayur tersebut menuju ke kota kecil. Dari kota kecil, hasil bumi itu dibawa lagi ke kota besar seperti Malang dan Jakarta. Dukungan Kementerian PUPR dilihat dari kebutuhan suatu desa. Misalnya suatu desa membutuhkan air minum, maka Ditjen Cipta Karya mengolah air minum untuk masyarakat.

Desa dan kota kecil mempunyai keterkaitan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) juga menjalankan perannya, untuk merencanakan pengembangan kawasan perdesaan, karena tugas BPIW sudah jelas, yakni melakukan *planning, organizing, upgrading, dan controlling*.

atau ketergantungan, baik sebagai produsen maupun konsumen. Melihatnya seperti ini, desa mensuplai kebutuhan bahan pokok ke kota. Namun desa juga membutuhkan beberapa hal, misalnya pakaian, buku, dan alat tulis. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi kota. Antar desa juga dapat juga saling ketergantungan, bila produksi yang dihasilkan berbeda. Misalnya suatu desa menjual wortel dan desa yang lain menjual hasil dari peternakan. Jadi antar desa dapat saling menjual komoditi yang dibutuhkan.

Target pengembangan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa dari 74 ribu desa di Indonesia, terdapat 2 ribu desa ditargetkan berkembang menuju desa mandiri. Selanjutnya sebanyak 5 ribu desa tertinggal ditargetkan dapat menuju desa berkembang. Dengan dilakukannya pengembangan desa ini, maka kemajuan suatu desa dapat menggeliat, meski belum menjadi pusat pertumbuhan. Paling tidak dengan langkah tersebut, maka produksi

hasil pertanian maupun perkebunan dapat diolah dan dipasarkan ke kota.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR juga menjalankan perannya, untuk merencanakan pengembangan kawasan perdesaan, karena tugas BPIW sudah jelas, yakni menterpadukan perencanaan dan pemrograman dalam siklus POAC atau *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Dalam siklus POAC tersebut BPIW perannya di hulu, artinya pada urusan perencanaan yang merupakan arahan dalam membangun. Dengan demikian BPIW harus membuat perencanaan pembangunan perdesaan itu di hulu, supaya nanti fisiknya dibangun satminkal, misalnya Ditjen Cipta Karya membangun air minum dan sanitasi. Kemudian Ditjen Bina Marga membangun jalan-jalan daerah dan juga K/L lain sesuai sektor yang dibutuhkan.

Perencanaan yang kita buat bersifat rencana induk atau masterplan kawasan. Dengan adanya masterplan, maka masing-masing pihak yang terlibat dalam pembangunan lintas sektor sudah mengetahui apa yang menjadi tugasnya masing-masing.

Itulah fungsi BPIW yakni menyusun, dan menterpadukan program perencanaan tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun pertama produksi pertanian membutuhkan air baku, maka kita sampaikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) untuk menyediakan air baku. Ketika tanaman kakao, misalnya, sudah siap untuk dipasarkan, maka Ditjen Cipta Karya perlu membuat pasar dalam skala pelayanan regional.

Kita harus bersinergi dalam melakukan pembangunan infrastruktur sehingga hasilnya dapat lebih maksimal. Dengan bersinergi, maka kawasan perdesaan dapat tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya pengembangan kawasan tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mensejahterahkan masyarakat desa.

Wilayah Pertumbuhan Strategis 5 JAMBI-PALEMBANG-PANGKAL PINANG-TANJUNG PANDAN 2025

ULTIMATE

Program ultimate pada WPS 5 sampai dengan tahun 2025 ini akan mendukung pengembangan kawasan strategis diantaranya; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Muoro Jambi dsk dengan daya tarik Bentang alam, situs bersejarah dan tempat ibadah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang berfokus pada industri pengolahan karet, industri pengolahan sawit dan industri petrokimia. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang yang terletak di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Serta Kawasan Industri Bangka dengan luas 263,26 Ha. Selain itu pengembangan infrastruktur dari berbagai sektor juga dikembangkan, diantaranya dari sektor Sumber Daya Air akan mengembangkan Bendungan Pice Besar yang memiliki debit 29,4m³/detik. Dari sektor Cipta Karya akan membangun infrastruktur cipta karya terpadu di perkotaan Jambi dan Belitung. Dari sektor Bina Marga akan mendukung pembangunan jalan tol Rengat-Jamni-Betung, serta jalan tol Palembang-Tanjung Api Api. Sedangkan dari sektor perumahan akan mendukung Perumahan di Simpul Perkotaan yang memiliki manfaat mendukung perkembangan wilayah Bangka-Belitung.

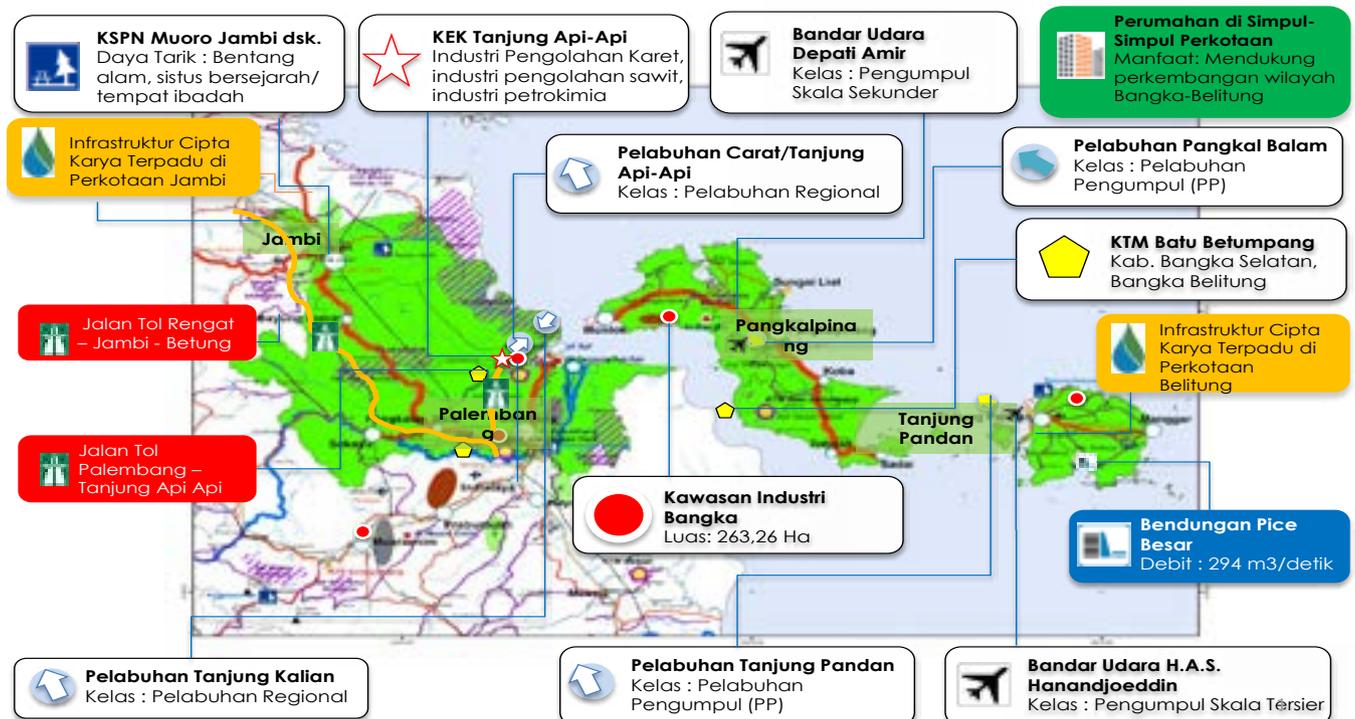
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan mendukung akses dari maupun ke Pelabuhan dan Bandara diantaranya: Bandar Udara Depati Amir dengan kelas pengumpul skala sekunder, bandar udara H.A.S. Hanandjoeddin dengan kelas pengumpul skala tersier, pelabuhan Carat/Tanjung Api Api dengan kelas Pelabuhan Regional, Pelabuhan Tanjung Kalian dengan kelas Pelabuhan Regional, Pelabuhan Tanjung Pandan dengan Kelas PELabuhan Pengumpul dan pelabuhan Pangkal Batam dengan kelas Pelabuhan Pengumpul.

Program Utama

Program utama yang di susun hingga tahun 2017 ini melingkupi pembangunan di sektor Bina Marga, Cipta Karya serta Perumahan. Dari Sektor Bina Marga akan membangun jalan akses menuju pelabuhan Kuala Tungkal, jalan lingkar Jambi-Talang Duku, pelebaran jalan batas provinsi Jambi-Maur, Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul, pembangunan jembatan Teluk Belinyu, jalan Tanjung Kelian-Petaling-Pangkalpinang, pelebaran jalan Tanjung Kelian-Ibul, Ibul-Kelapa, Kelapa-Batas Kab. Bangka Barat, Puding Besar-Bts Kota Pangkalpinang, Sungai Liat, jalan Koba-Lubuk Besar-Tanjung Berikat, Jalan Petaling-Namang-Toboali. Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, jalan Pile Slab Arteri Primer Tanjung Api-Api Tanjung Carat (15km), pelebaran Jalan Betung-Batas Kota Palembang, serta pelebaran jalan batas kota Palembang-SP Indralaya. Selain itu akan dibangun Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api yang merupakan bagian dari pembangunan tol Sumatera, dan jalan tol Rengat-Jambi-Betung (DED).

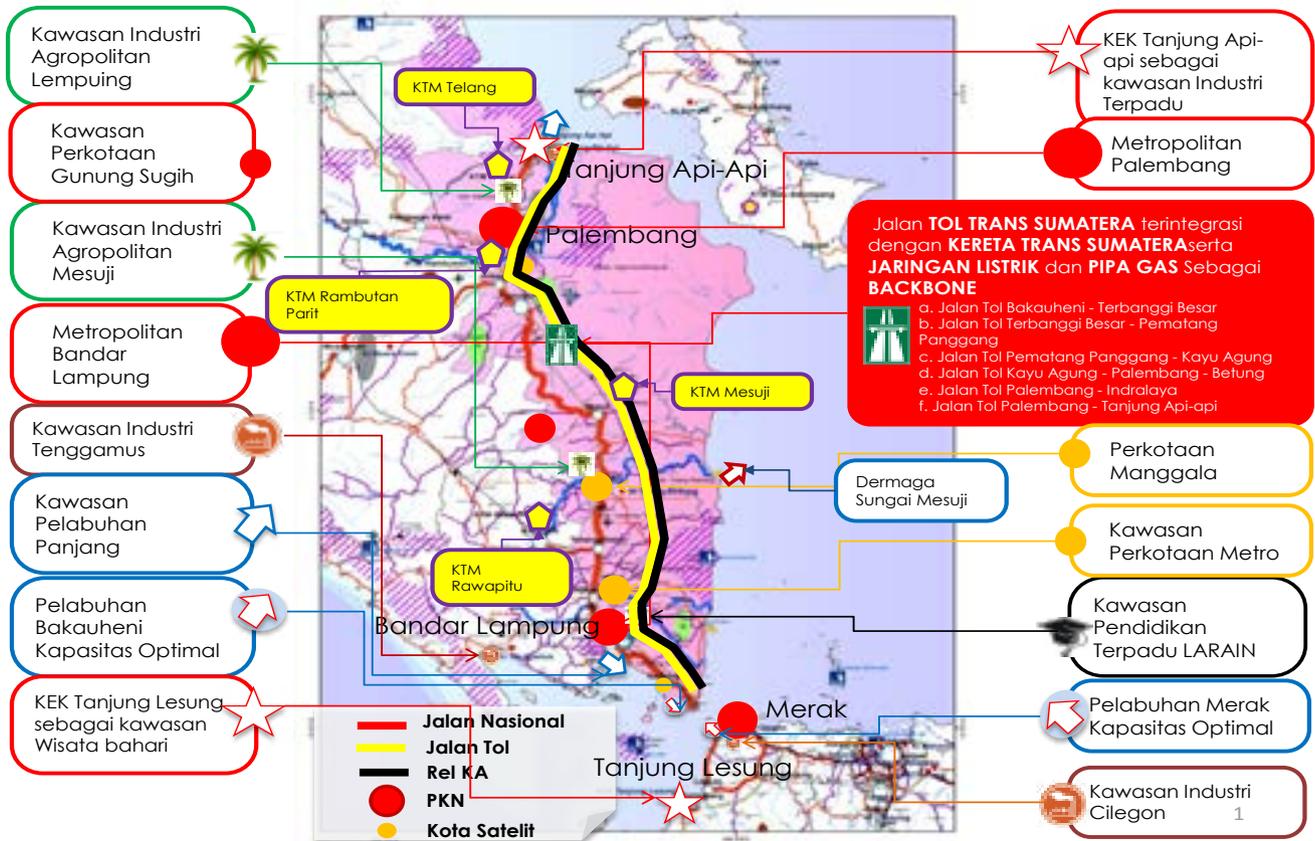
Dari Sektor Ciptakarya akan mendukung dengan adanya pembangunan SPAM kawasan Sungsang, IKK Cengal, IKK Cinta Manis, IKK Tirto Mulyo, IKK Pedamaran Timur, IKK Sungai Menang, IKK Rambang Kuang, Pembangunan IPAL kawasan Sungsang serta Pembangunan IPAL Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Sektor Sumber Daya Air (SDA) juga turut mendukung pembangunan pada WPS 5 ini melalui pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing, pembangunan waduk pengendali banjir dan sumber air baku kawasan tanjung api-api serta pembangunan banjir KL Gasing dan kawasan Sungsang. Dan dari Sektor Perumahan akan membangun rumah umum tapak layak huni yang terfasilitasi melalui bantuan PSU, pembangunan rumah susun terbangun berserta PSU dan Meubelair serta pembangunan rumah susun untuk buruh/MBR di kawasan industri Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

ULTIMATE WPS 5 JAMBI – PALEMBANG – PANGKAL PINANG – TANJUNG PANDAN 2025



Wilayah Pertumbuhan Strategis 6 Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Tanjung Api-Api (MBBPT)

ULTIMATE WPS 6 MBBPT 2025



Ultimate

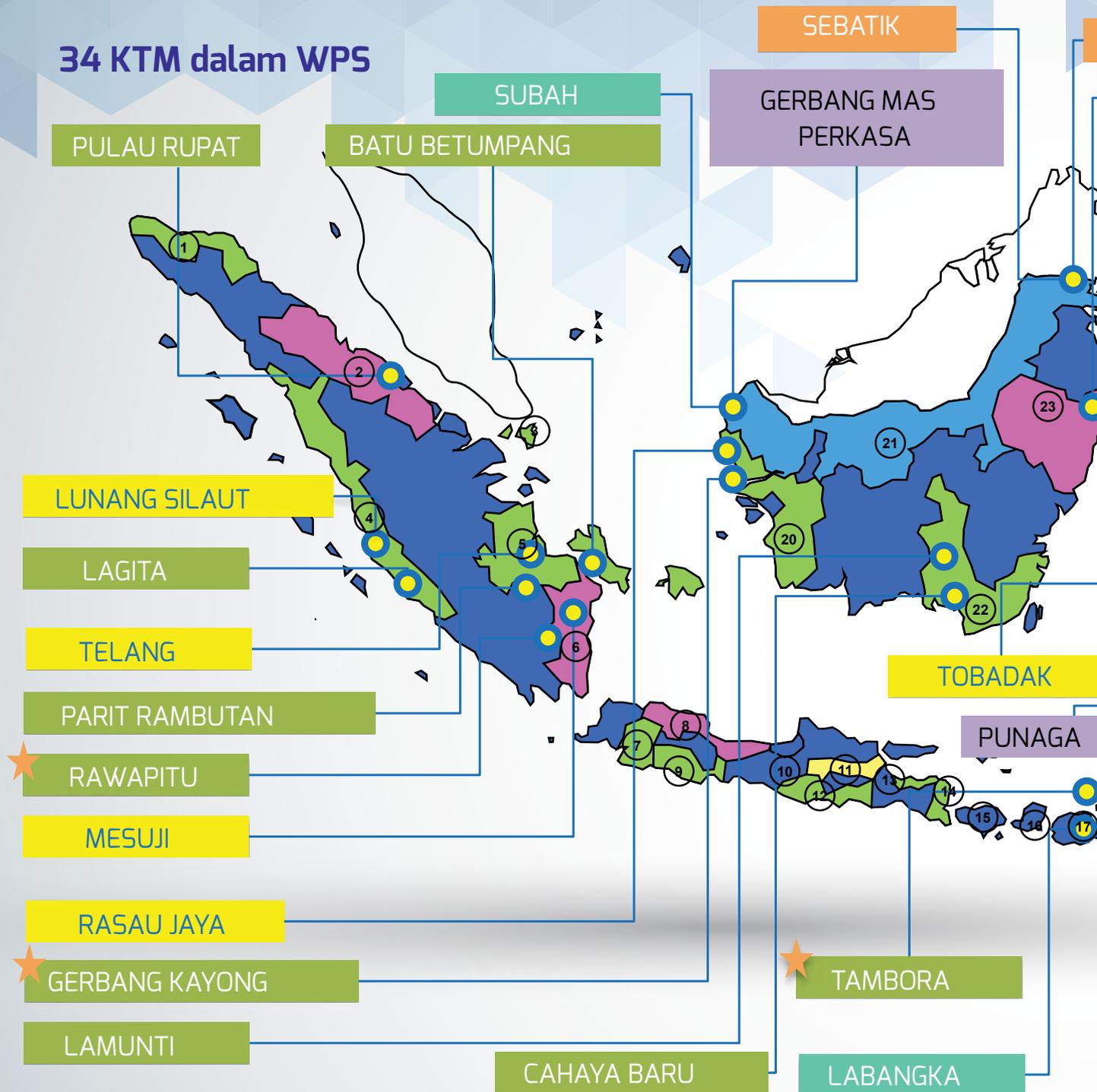
WPS 6 MBBPT memiliki program utama di Tahun 2017, yaitu dari sektor Sumber Daya Air (SDA) terdapat pembangunan Bendungan Segalamider di Lampung Timur, pembangunan Bendungan Sukaraja 3 di Lampung Tengah, lanjutan pembangunan Bendungan Sukoharjo Pesawaran dan lanjutan pembangunan Waduk Sindang Heula. Dari sektor Cipta Karya terdapat pembangunan SPAM Regional Kawasan Pelabuhan Panjang dan pembangunan konstruksi SPAM Perkotaan Kalianda. Adapun dari sektor Bina Marga terdapat 9 program utama, yaitu pembangunan Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api yang saat ini dalam proses pembebasan lahan, pembangunan Jembatan Musi III Palembang, pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang, pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung yang saat ini dalam proses pembebasan lahan, konstruksi lanjutan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, pembangunan Jalan Tol dari pintu tol menuju Pelabuhan Merak, pembangunan perlintasan tak sebidang Tugu Raden Intan Kota Bandar Lampung dan pembangunan perlintasan tidak sebidang Sp. Pelabuhan Panjang. Dalam sektor penyediaan perumahan terdapat pembangunan Rumah Susun untuk Wisma Atlet di Jakabaring, pembangunan Rumah Susun untuk Kawasan Pel. Panjang dan pembangunan Rumah Susun Mahasiswa ITERA.

Program Utama

WPS 6 MBBPT memiliki beberapa Ultimate tahun 2025, yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang terintegrasi dengan Kereta Trans Sumatera serta jaringan listrik dan pipa gas sebagai backbone, adapun Jalan Tol Trans Sumatera yaitu mencakup Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung, Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung, Jalan Tol Palembang – Indralaya dan Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api. Jalan Trans Sumatera ini nantinya akan menjadi backbone yang mendukung Kawasan Industri Tenggamas dan Kawasan Industri Cilegon, kawasan perkotaan Gunung Sugih, kawasan perkotaan Manggala dan Kawasan Perkotaan Metro, Kawasan Agropolitan Lempuing dan Kawasan Agropolitan Mesuji, Kawasan Pelabuhan Panjang, Kawasan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak, KEK Tanjung Lesung sebagai kawasan wisata bahari dan KEK Tanjung Api-Api sebagai kawasan industri terpadu, serta Kawasan Pendidikan Terpadu LARAIN.

KETERPADUAN DENGAN PENGEMBANGAN 48

34 KTM dalam WPS



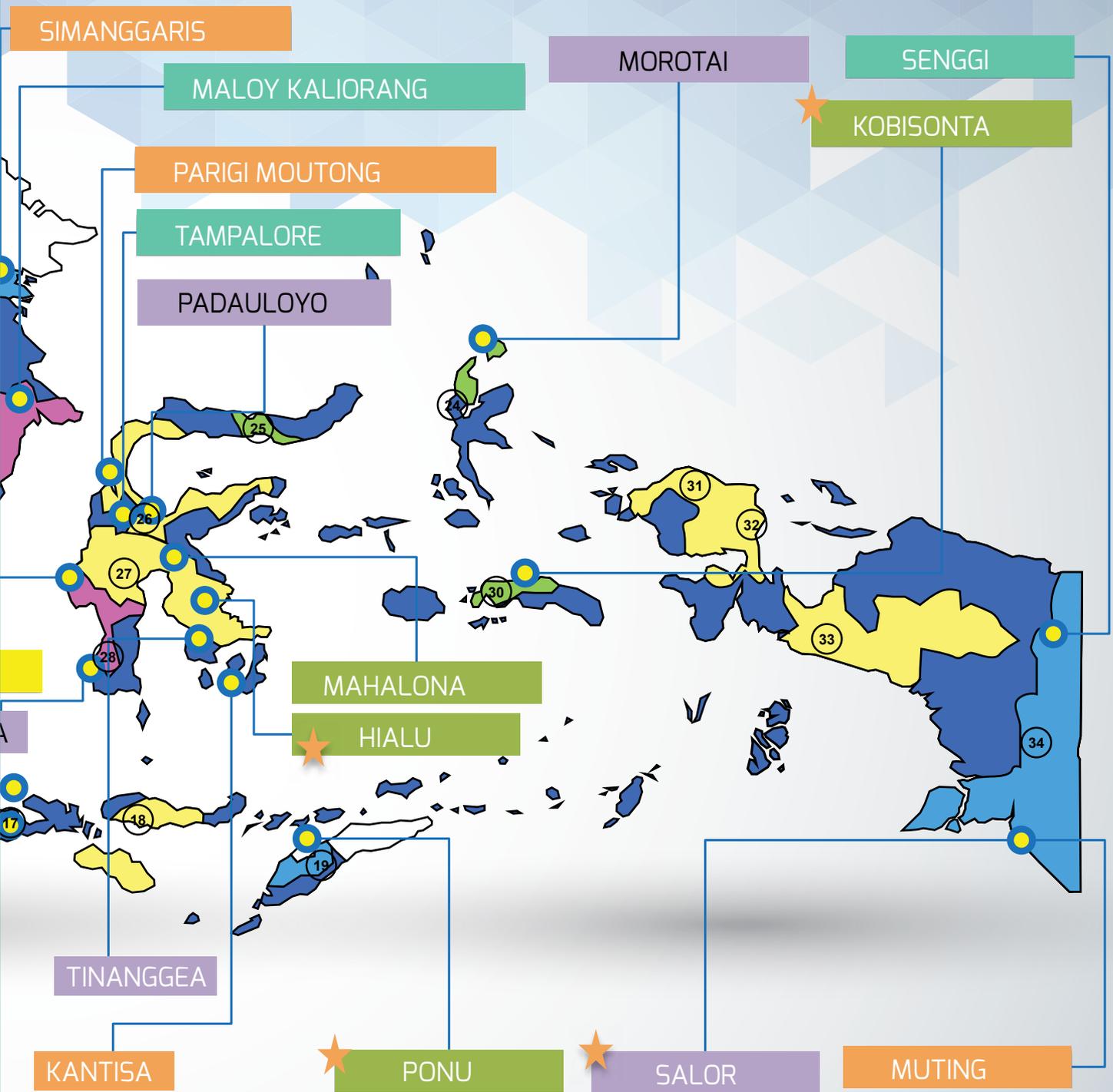
14 KTM diluar WPS

PROVINSI	KTM diluar WPS
ACEH	KETAPANGUSANTARA
	SAMARKILANG
JAMBI	GERAGAI
	BATINIII ULU
	PAUHMANDIANGIN

PROVINSI	KTM diluar WPS
SUMSEL	KIKIM
	BELITANG
LAMPUNG	WAYTUBA
KALTIM	LABANAN
KALTARA	SALIMBATU

PROVINSI	KTM diluar WPS
SULBAR	SARUDUBARAS
SULTENG	AIR TERANG
	BUNGKU
GORONTALO	PAWONSARI

KOTA TERPADU MANDIRI TRANSMIGRASI



Rencana Penanganan

- : 2015 (6)
- : 2016 (15)
- : 2017 (12)
- : 2018 (7)
- : 2019 (8)

★ 7 Prioritas Penanganan KTM Tahun 2016

TBS Land Airbus, Transportasi Masa Depan yang 'Mengapung'



Blocking Equipment, untuk mencegah mobil masuk saat emergency stop dilakukan

Sumber: istimewa

“TBS Land Airbus diperkirakan akan menampung sampai dengan 300 penumpang dengan desain interior Airbus yang futuristik”

Cina bergerak cepat dalam menggagas transportasi publik yang modern. Sekitar 3 tahun yang lalu, “3D Fast Bus” telah membuat orang banyak senang dan tertarik dengan prospek dari transportasi tersebut dalam mengatasi kemacetan. Kini, TBS China, salah satu perusahaan transportasi terkemuka di China telah meluncurkan “TBS Land Airbus” atau yang dikenal dengan “Straddling Bus” yaitu sebuah kendaraan besar yang tentunya sangat efektif dalam mengurai kemacetan di daerah perkotaan. Kendaraan ini lebih panjang dari versi sebelumnya yaitu 3D Fast Bus, dapat menekuk ketika ada belokan, dan memungkinkan kendaraan yang lebih kecil untuk lewat dibawahnya.

Inovasi teknologi transportasi yang luar biasa ditunjukkan Cina guna mengurangi kemacetan. Cina benar-benar mencari solusi dengan menciptakan transportasi perkotaan modern, interior mewah berteknologi tinggi.

TBS China telah merilis video bus berteknologi tinggi ini di media sosial dan dapat dilihat di Youtube. Terlihat dua jalur lalu lintas

melintas dibawah rongga bus. TBS China mengklaim bahwa dibandingkan Metro, bus ini jauh lebih murah biayanya, memiliki masa konstruksi pendek dan sesuai kapasitas penumpang. Moda transportasi publik ini adalah cara yang ekonomis dan aman sekaligus solusi mengurangi kemacetan dan warga kota tidak menghabiskan berjam-jam terjebak kemacetan lalu lintas.

Video yang berdurasi 3 menit tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai cara kerja kendaraan unik ini secara detil. TBS Land Airbus menggunakan Air Lift Stations dimana halte bus terletak diatas dari Airbus tersebut. Solusi transportasi urban ini memiliki interior berteknologi tinggi. Para penumpang dapat masuk ke dalam bus ini dengan menggunakan lift yang terbuat dari kaca yang sangat aman. Ketika para penumpang sedang masuk ke dalam kendaraan, hal ini tidak akan menyebabkan kemacetan karena para pengendara yang lainnya tetap bisa berlalu lalang di bawah "Straddling Bus" ini. TBS Land Airbus diperkirakan akan menampung sampai dengan 300 penumpang dengan desain interior Airbus yang futuristik dan menggunakan kaca transparan pada bagian atas sehingga penumpang dapat melihat pemandangan dari dalam Airbus selama perjalanan. TBS Land Airbus dilengkapi dengan beberapa panel indikator seperti *under-part indicator* dan video monitoring indicator untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat mobil-mobil melintasi dibawah Airbus tersebut.

TBS Land Airbus juga dilengkapi dengan yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika

ada kecelakaan atau hambatan di jalur Airbus. Selain itu, TBS Land Airbus juga dilengkapi dengan blocking equipment yang membantu sistem evakuasi penumpang saat emergency brake system digunakan, sehingga mobil-mobil yang melintasi dibawah Airbus tidak akan mengganggu proses evakuasi. TBS Land Airbus menggunakan kecepatan rata-rata 25 mil per jam.

TBS China mengatakan bahwa "Straddling Bus" ini sangat ekonomis, efisien, dapat memuat kendaraan lebih banyak dibanding bus pada umumnya dan aman tentunya. Apakah konsep "Straddling Bus" ini bisa menjadi jawaban atas kemacetan Ibukota di masa depan? **INI/InfoBPIW**



Konsep TBS Land Airbus



Ekstotisme 3 Gili Lombok

Panorama Pantai Dodola

Sumber: Dok BPIW

Gili atau biasa disebut dengan “Desa Dunia” merupakan pulau kecil yang berada di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tiga Gili atau yang biasa disebut Triple Gili, merupakan kawasan wisata yang bukan hanya menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara saja tapi menjadi primadona bagi wisatawan Asing. Seiring waktu Pulau Tiga Gili tersebut sukses menjadi wisata populer di Indonesia dan menjadi primadona wisatawan Mancanegara. Berkat keberadaan Pulau Tiga Gili ini pula, Lombok semakin dikenal sebagai tempat wisata setelah Bali, Kekayaan Lombok akan destinasi-destinasi wisatanya yang natural mulai banyak di*explore*, bahkan kini Pulau Lombok menempati peringkat ke 4 sebagai destinasi wisata terindah di Asia. Berikut penjabaran pesisir Tiga Gili; Trawangan, Meno, dan Air yang memiliki keunggulan masing-masing.

GILI TRAWANGAN

Gili terawangan ini menjadi tempat terbaik bagi para wisatawan dikarenakan fasilitas yang tersedia di tempat ini lebih memadai, seperti banyaknya penginapan dan restoran yang berjejer di sepanjang jalan. Ditiga gili ini, tidak terdapat kendaraan bermotor, karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Sarana transportasi yang lazim adalah sepeda yang disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan dengan harga 50-60ribu perhari dan cidomo, kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok. Untuk bepergian ke dan dari ketiga gili itu, penduduk biasanya menggunakan kapal bermotor dan speedboat. Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Hal ini terjadi karena Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap timur dan menghadap barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini.

GILI MENO

Gili Meno adalah gili yang terkecil dan yang gili yang paling sedikit dikunjungi oleh wisatawan. Gili ini tidak seperti dua gili lainnya yang lebih dulu berkembang dan merupakan gili yang paling tenang. Di Gili Meno, Anda akan menemukan hamparan pantai berpasir putih yang masih alami dengan suasana alam yang masih alami juga. Yang menjadi daya tarik dari Gili Meno adalah adanya taman burung yang memiliki koleksi bermacam-macam burung dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selain itu di gili ini juga terdapat Danau air asin dan beberapa tempat untuk

diving yang terkenal seperti Meno Wall, Sea Turtle Point dan Blue Coral Point. Gili di bagian timur pulau ini sangat bagus dan cocok untuk snorkeling karena di sini Anda akan menjumpai penyu bebas berenang dan species karang berwarna-warni.

GILI AIR

Gili Air masih mempertahankan daya tarik pedesaan. Gili Air merupakan pulau dengan penduduk yang paling banyak diantara dua gili lainnya yang mencapai 1.000 orang. Penduduk lokalnya adalah suku Sasak, Mandar, Bugis dan Makassar. Sehingga

Anda dapat menemukan budaya yang unik yang berbeda-beda. Gili Air merupakan tempat favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan ingin lebih terlibat secara

interaksi sosial dengan penduduk asli pulau ini.

Menurut pengamatan langsung Tim Humas BPIW, pulau Gili Lombok ini sangat tepat untuk dijadikan tujuan wisata bagi Anda yang ingin menikmati keindahan panorama alam Indonesia. Di Pulau Gili Lombok ini, Anda dapat menikmati matahari terbit dari

balik Gunung Rinjani, menikmati matahari terbenam di pinggir pantai dengan latar belakang Gunung Agung di Bali, serta berbagai atraksi bahari yang disukai, seperti diving dan snorkling. Selain itu, dengan keunikan “No Car, No Motor Bycle”

Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati *sunset* dan juga *sunrise* sekaligus di pantai ini.

sudah pasti pulau Gili Lombok memberikan udara yang bersih karena terbebas dari polusi udara.



Salah Satu Cottage di Gili Trawangan

Sumber: Dok BPIW

Penandatanganan Kesepakatan Kota Baru Maja

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Kota Baru Maja, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan empat pengembang, yakni Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk.



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menandatangani kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Maja



Foto bersama Menteri PUPR, Kepala BPIW, Walikota, Bupati dan stakeholder yang terkait dengan pengembangan Kota Baru Maja



Peserta penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Maja



Menteri PUPR dan Kepala BPIW beserta stakeholder saat press conference berlangsung

Professional Forum

BPIW bersama Eastern Regional Organization for Planning and Human (EAROPH) mengadakan Professional Forum dengan tema “Mendorong Kota Produktif dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola yang Baik” yang bertujuan untuk menghimpun masukan atau saran untuk menuju Preparatory Committee (PrepCom) 3 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 25-27 Juli 2016 mendatang.



Bernardus Djonoputro, Ketua Umum IAP menjelaskan Restrospeksi Tata Kelola Kota di Indonesia



Narasumber pada EAROPH-BPIW Professional Forum dengan tema Mendorong Kota Produktif dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola yang Baik.JPG



Media saat melakukan press conference pada acara ini



Norliza Hashim, Sekretaris EAROPH beserta Kepala BPIW dan jajaran saat press conference

Mata Tetap Sehat Didepan Layar Komputer



Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, komputer/laptop menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari saat bekerja. Hampir semua pekerjaan melibatkan penggunaan komputer atau laptop. Namun, di balik manfaat yang di dapatkan dari penggunaan komputer atau laptop tersebut, anda juga perlu mewaspadaai bahayanya terhadap kesehatan.

1. Jaga jarak dengan layar komputer

Untuk menghindari pancaran sinar dari layar komputer yang kurang baik bagi mata, jaga jarak pandang Anda. Jangan terlalu dekat dengan layar monitor. Standart jarak antara mata dan layar komputer adalah 50 sampai 100 cm. Dengan begitu, mata anda juga tidak akan cepat terasa panas dan pedih.

2. Mengatur Kecerahan pada Layar Monitor

Penting juga untuk memperhatikan cara yang satu ini, yaitu mengatur kecerahan pada layar monitor. Untuk menjaga kesehatan

mata, sebaiknya jangan menyeting layar komputer terlalu terang. Cerahnya layar monitor dapat mempengaruhi tingkat fleksibilitas pada otot mata yang membuat mata menjadi tidak nyaman dan cepat terasa lelah. Hindari kondisi layar terlalu cerah dan hindari juga kondisi layar terlalu redup. Anda harus menyeimbangkan kondisi layar pada monitor.

3. Tempatkan Komputer Di Ruangannya Cukup akan Cahaya

Menempatkan komputer di ruangan cukup cahaya menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan. Ini bertujuan untuk mengurangi efek samping pada kesehatan mata. Secara medis menggunakan komputer di tempat yang redup dengan kondisi sinar yang dihasilkan layar dapat mempengaruhi kinerja mata.

4. Mengistirahatkan Mata Secara Berkala

Frekuensi normal berkedip adalah 18 kali

tiap menit, namun ketika di depan komputer, anda terlalu memfokuskan pandangan sehingga jarang berkedip. Sering-seringlah mengedipkan mata agar mata tidak cepat terasa nyeri dan sakit. Anda juga bisa mengalihkan pandangan ke luar ruangan. Untuk mengatasi mata perih dan kering, anda perlu mengedipkan mata lebih sering daripada biasanya. Ini juga mencegah resiko penyakit mata. Dan juga untuk selalu memberi waktu istirahat selama kurang lebih 5 menit setiap jamnya.

5. Perbanyak Konsumsi Buah dan Sayuran

Mengonsumsi buah dan sayuran sangat penting untuk menunjang kesehatan tubuh, sayur dan buah-buahan mengandung vitamin yang bermanfaat untuk tubuh salah satunya adalah kesehatan mata. Mata membutuhkan vitamin A yang bisa didapatkan melalui sayur-sayuran serta buah tersebut. Bagi Anda yang sering berhadapan di depan layar monitor, alangkah baiknya untuk mengimbangi dengan mengonsumsi makanan sehat tersebut.



Siap Memudahkan Perizinan

Iti Octavia Jayabaya

Bupati Lebak Provinsi Banten

Semua kepala daerah di Indonesia sangat menginginkan daerah yang dipimpinnya tumbuh dan berkembang. Hal itu juga dirasakan Bupati Lebak Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, ketika pemerintah pusat berencana mengembangkan Kecamatan Maja yang berada di Kabupaten Lebak, menjadi Kota Baru Publik Maja. Iti pun sangat bersyukur, pengembangan kota baru publik tersebut dikonkritkan dengan telah dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama, bertempat di Kementerian PUPR, Senin, 27 Juni lalu.

Penandatanganan tersebut merupakan langkah percepatan dan juga merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat tersendat pada tahun 1994 lalu. Maja merupakan satu dari 10 daerah yang direncanakan pemerintah pusat untuk dikembangkan.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan Maja. Memang ini menjadi cita-cita bersama, terutama Kabupaten Lebak dan juga Pemerintah Provinsi Banten. Apalagi jarak Kabupaten Lebak dengan Ibukota Negara, yakni Jakarta, hanya sekitar 70 kilometer.

Dengan jarak yang tidak terlalu jauh itu, maka Maja menjadi salah satu penyangga DKI Jakarta," ujar Iti usai penandatanganan kerjasama tersebut.

Penandatanganan tersebut melibatkan unsur dari pemerintah pusat (yang diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah daerah (yang diwakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang), dan pihak pengembang (yang diwakili Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk. Guna mendukung terwujudnya Kota Baru Pulik Maja ini, Iti menegaskan Pemerintah Kabupaten Lebak akan mempermudah segala proses perizinan. Memudahkan semua proses perizinan, sebenarnya

telah dilakukan kabupaten tersebut. Kemudahan proses perizinan ini menurut Iti telah dirasakan para pengembang. "Dari pihak pengembang, terutama dari Hansen Grub telah menyampaikan langsung kepada saya, bahwa di Lebak perizinannya paling mudah. Ini bukti kita sudah melakukan kemudahan dalam perizinan. Kita siap terus melakukan kemudahan dalam melakukan proses perizinan terkait pengembangan Maja sebagai Kota Baru Publik," ucap Iti.

Menurut Iti, Maja dipilih untuk dikembangkan menjadi kota baru publik, dikarenakan ketersediaan lahan dan sudah ada pengembang yang akan membangun perumahan dan permukiman di kawasan tersebut.

"Daerah Maja ini sarana dan prasarannya juga memadai, seperti tersedianya sarana transportasi berupa kereta api, dimana telah diresmikan penggunaan stasiun kereta api Maja, dua bulan yang lalu."

"Daerah Maja ini sarana dan prasarannya juga memadai, seperti tersedianya sarana transportasi berupa kereta api, dimana telah diresmikan penggunaan stasiun kereta api Maja, dua bulan yang lalu. Maja juga bebas banjir dan di Kabupaten Lebak juga sedang dibangun proyek nasional yakni Waduk Karian," tutur Iti.

Pengembangan Kota Baru Publik Maja juga didukung dengan tersedianya pipa gas untuk perumahan dan permukiman, dekat dengan kawasan industri, dan memiliki kawasan pariwisata. "Kawasan Baya

menjadi sektor industri disamping pariwisata, untuk pabrik semen, ada pabrik semen Merah Putih yang kapasitasnya terbesar se-Asia Tenggara. Jadi kalau Maja dikembangkan menjadi kota baru publik memang sangat bagus," kata Iti.

Dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, maka pengembangan daerah ini akan dilakukan hingga tiga tahun kedepan atau hingga 2019 mendatang. Iti berharap dalam kurun waktu tersebut banyak masyarakat Kabupaten Lebak yang memiliki rumah terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Sekarang sedang dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kabupaten Lebak yang belum memiliki rumah dengan subsidi dari pemerintah," ungkap Iti. **Hendra Djamal**

